



LAPORAN KINERJA

2025

**INTERIM
TRIWULAN II**

BALAI POM DI KEDIRI

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.42,
Banjaran, Kec. Kota, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur 64129
www.kediri.pom.go.id

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Interim Balai POM di Kediri Triwulan II Tahun 2025. BPOM di Kediri sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari Laporan Kinerja adalah

untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 BPOM di Kediri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Balai POM di Kediri Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM RI. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai POM di Kediri Triwulan II Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Kediri pada tahun selanjutnya.

Kediri, 21 Juli 2025

Kepala Balai POM di Kediri



Winanto, S.Si, Apt., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Kediri dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2025. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja strategis serta tantangan yang dihadapi selama periode tersebut.

Balai POM di Kediri sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Badan POM pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diamanatkan 9 (sembilan) sasaran kinerja dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.
2. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
8. Layanan Publik UPT yang prima
9. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Selama Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Kediri telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan, peningkatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan efektivitas produk obat dan makanan serta melindungi masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Kediri dari peredaran Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan.

Dari 9 (sembilan) sasaran kinerja, hanya 7 (tujuh) yang dapat disampaikan data capaiannya karena 2 (dua) sasaran kinerja lain baru dapat diperoleh capaiannya pada akhir tahun. Dari 7 (tujuh) sasaran kinerja yang dievaluasi, diperoleh hasil capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 103,72 dengan kategori **"ISTIMEWA"**. Hasil capaian tiap sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran kinerja pertama sebesar 115,55% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**;
2. Capaian Indikator pada sasaran kinerja kedua sebesar 98,36% dengan kriteria **Baik**;
3. Capaian Indikator pada sasaran kinerja kedua sebesar 107,90% dengan kriteria **Sangat Baik**;
4. Capaian Indikator pada sasaran kinerja keempat sebesar 101,08% dengan kriteria **Sangat Baik**;
5. Capaian indikator pada sasaran kinerja kelima sebesar 147,78% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**;
6. Capaian indikator pada sasaran kinerja keenam sebesar 88,11% dengan kriteria **Cukup**;
7. Capaian Indikator pada sasaran kinerja ketujuh sebesar 91.67% dengan kriteria **Baik**;
8. Belum ada capaian indikator pada sasaran kinerja kedelapan pada Triwulan II 2025 karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun;
9. Belum ada capaian indikator pada sasaran kinerja kesembilan pada Triwulan II 2025 karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

Persentase capaian Sasaran Kinerja Balai POM di Kediri pada triwulan II tahun 2025 antara 88,11 % sampai dengan 147,78 %. Capaian terendah pada Sasaran Kinerja “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” disebabkan karena perubahan target perkara tahun 2025 dari sebelumnya 1 perkara menjadi 2 perkara sebagai dampak relaksasi anggaran pada akhir TW I tahun 2025. Sedangkan capaian tertinggi pada Sasaran Kinerja “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, faktor yang mendukung keberhasilan sasaran strategis ini adalah pemberian bimbingan kepada pelaku usaha melalui berbagai media (layanan tatap muka di Kantor Balai POM di Kediri dan Loker Mall Pelayanan Publik, layanan chat dan telfon serta melalui aplikasi zoom meeting online) sehingga kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi di bidang sertifikasi meningkat.

Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kediri untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja didukung anggaran APBN sebesar Rp 24.238.563.000, namun pada awal tahun Presiden menerbitkan instruksi untuk efisiensi anggaran. Anggaran Balai POM dilakukan efisiensi sebesar 15.252.911.000 sehingga anggaran yang bisa digunakan hanya sebesar 9.005.252.000. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2025 adalah Rp 3.469.292.671,- atau sebesar 38,53%.

Selama Triwulan II tahun 2025, capaian kinerja Balai POM di Kediri sudah cukup baik namun realisasi anggaran belum optimal, hal ini disebabkan karena pada akhir triwulan I tahun 2025 beberapa kegiatan dikembalikan anggarannya (dibuka blokir) sehingga perlu upaya lebih cermat dalam melaksanakan kegiatan yang tertunda akibat dari blokir anggaran. Balai POM di Kediri akan mengoptimalkan realisasi kinerja dan anggaran dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan PoA yang telah ditetapkan
- Mempercepat pengadaan barang dan jasa yang belum terlaksana pada Triwulan I tahun 2025
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta segera melakukan optimalisasi kegiatan yang tidak terlaksana.

HIGHLIGHT KINERJA

Pada periode TW II tahun 2025, Balai POM di Kediri terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja. Salah satu langkah nyata berupa komitmen untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini bertujuan menciptakan budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh lingkungan Organisasi. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Balai POM di Kediri antara lain:

1. Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan seluruh pegawai;
2. Menciptakan inovasi yang memiliki daya ungkit terhadap kinerja dan pelayanan publik;
3. Melakukan internalisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan *awareness* pegawai terhadap pentingnya Reformasi Birokrasi.

Selain itu, Balai POM di Kediri juga mendorong inovasi dalam manajemen kinerja, antara lain melalui pengembangan sistem pemantauan berbasis digital dan penerapan metode evaluasi kinerja berbasis *outcome* untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Manajemen kinerja yang efektif akan berdampak pada produktivitas pegawai sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT KINERJA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
BAB IV PENUTUP	166
LAMPIRAN I	169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Kerja Balai POM di Kediri	3
Gambar 2 Struktur Organisasi UPT BPOM	6
Gambar 3 Chart Kinerja UPT	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jarak Tempuh ke Wilayah Kerja	3
Tabel 2 Sasaran Strategis Balai POM di Kediri	18
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	22
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	27
Tabel 6 Kriteria Pencapaian Indikator Tahun 2025	30
Tabel 7 Pencapaian Nilai Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2025	31
Tabel 8 Perbandingan antara target tahunan 2025 dengan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2025	35
Tabel 9 Perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan realisasi Triwulan II tahun 2024	37
Tabel 10 Perbandingan target dan realisasi sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025	41
Tabel 11 Perbandingan target tahunan dan realisasi sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2025	41
Tabel 12 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 pada sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	41
Tabel 13 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	43
Tabel 14 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	43
Tabel 15 Perbandingan Target Dan Realisasi pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO Triwulan II Tahun 2025	44
Tabel 16 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 pada pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	45
Tabel 17 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	45
Tabel 18 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	46
Tabel 19 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	46
Tabel 20 Perbandingan Target Dan Realisasi sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025	47
Tabel 21 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 pada sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan	48
Tabel 22 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 pada sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan	48
Tabel 23 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	50
Tabel 24 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	50
Tabel 25 Perbandingan Target Dan Realisasi sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan II tahun 2025	52
Tabel 26 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 pada sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	52
Tabel 27 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	52
Tabel 28 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja	54
Tabel 29 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya	55

Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	56
Tabel 31 Perbandingan Target Tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	56
Tabel 32 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
Tabel 33 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59
Tabel 34 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	59
Tabel 35 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60
Tabel 36 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	61
Tabel 37 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	61
Tabel 38 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	62
Tabel 39 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	62
Tabel 40 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
Tabel 41 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
Tabel 42 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
Tabel 43 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67
Tabel 44 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68
Tabel 45 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69
Tabel 46 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69
Tabel 47 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	69
Tabel 48 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	71
Tabel 49 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	72
Tabel 50 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025 fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73
Tabel 51 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73

Tabel 52 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73
Tabel 53 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76
Tabel 54 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77
Tabel 55 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78
Tabel 56 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78
Tabel 57 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78
Tabel 58 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	79
Tabel 59 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
Tabel 60 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81
Tabel 61 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81
Tabel 62 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82
Tabel 63 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84
Tabel 64 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85
Tabel 65 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
Tabel 66 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
Tabel 67 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
Tabel 68 Analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
Tabel 69 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal dan eksternal) sebelumnya pada sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
Tabel 70 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025 nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	90
Tabel 71 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	90
Tabel 72 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	90
Tabel 73 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	92

Tabel 74 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium	92
Tabel 75 Perbandingan target triwulan I dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	94
Tabel 76 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	94
Tabel 77 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	94
Tabel 78 Kategori hasil penilaian indeks efektivitas KIE	95
Tabel 79 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	96
Tabel 80 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	97
Tabel 81 Perbandingan terget dan realisasi triwulan II tahun 2025 jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....	98
Tabel 82 Perbandingan terget tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....	98
Tabel 83 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....	98
Tabel 84 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....	100
Tabel 85 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....	100
Tabel 86 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 jumlah desa pangan aman	101
Tabel 87 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 jumlah desa pangan aman	101
Tabel 88 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 jumlah desa pangan aman	101
Tabel 89 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada jumlah desa pangan aman	104
Tabel 90 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada jumlah desa pangan aman	104
Tabel 91 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 jumlah pasar aman berbasis komunitas	106
Tabel 92 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 jumlah pasar aman berbasis komunitas	106
Tabel 93 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 jumlah pasar aman berbasis komunitas	106
Tabel 94 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada jumlah pasar aman berbasis komunitas	109
Tabel 95 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada jumlah pasar aman berbasis komunitas	110
Tabel 96 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kosmetik yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan.....	113

Tabel 97 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	113
Tabel 98 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	114
Tabel 99 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	115
Tabel 100 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	116
Tabel 101 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.....	119
Tabel 102 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	119
Tabel 103 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	119
Tabel 104 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	121
Tabel 105 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	121
Tabel 106 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	123
Tabel 107 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	124
Tabel 108 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	124
Tabel 109 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar ...	125
Tabel 110 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	125
Tabel 111 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 indeks pelayanan publik UPT..	128
Tabel 112 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 indeks pelayanan publik UPT	128
Tabel 113 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 indeks pelayanan publik UPT	129
Tabel 114 Rekomendasi perbaikan kinerja indeks pelayanan publik UPT.....	129
Tabel 115 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada indeks pelayanan publik UPT	131
Tabel 116 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada indeks pelayanan publik UPT	131
Tabel 117 Komponen pengungkit nilai pembangunan ZI	133
Tabel 118 Komponen hasil nilai pembangunan ZI	133

Tabel 119 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 nilai pembangunan ZI UPT BPOM	134
Tabel 120 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 nilai pembangunan ZI UPT BPOM	134
Tabel 121 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 nilai pembangunan ZI UPT BPOM.....	134
Tabel 122 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada nilai pembangunan ZI UPT BPOM.....	135
Tabel 123 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada nilai pembangunan ZI UPT BPOM	135
Tabel 124 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 nilai AKIP UPT BPOM	136
Tabel 125 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 nilai AKIP UPT BPOM.....	136
Tabel 126 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 nilai AKIP UPT BPOM	137
Tabel 127 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja nilai AKIP UPT BPOM	138
Tabel 128 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya nilai AKIP UPT BPOM	138
Tabel 129 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 nilai kinerja anggaran UPT BPOM	140
Tabel 130 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 nilai kinerja anggaran UPT BPOM	140
Tabel 131 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 nilai kinerja anggaran UPT BPOM.....	140
Tabel 132 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja nilai kinerja anggaran UPT BPOM.....	141
Tabel 133 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada nilai kinerja anggaran UPT BPOM	141
Tabel 134 Kategori nilai maturias manajemen risiko.....	142
Tabel 135 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 indeks manajemen risiko UPT BPOM	143
Tabel 136 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 indeks manajemen risiko UPT BPOM.....	143
Tabel 137 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 indeks manajemen risiko UPT BPOM.....	143
Tabel 138 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada indeks manajemen risiko UPT BPOM	145
Tabel 139 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada indeks manajemen risiko UPT BPOM.....	145
Tabel 140 Tindak lanjut rekomendasi Inspektorat terhadap penilaian AKIP BPOM di Kediri Tahun 2024	152

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis kesehatan dan pembangunan ekonomi, Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Balai POM di Kediri melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya.

Meningkatnya sektor usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan hampir diseluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk melakukan kegiatan pengawasan yang seoptimal mungkin diseluruh wilayah Indonesia sehingga perlu dibentuk organisasi di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memberikan daya ungkit bagi terpenuhinya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Kediri menyadari pentingnya perubahan paradigma ini juga disikapi dengan kebijakan penguatan kapasitas Balai POM di Kediri untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Balai POM di Kediri di tengah masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat,

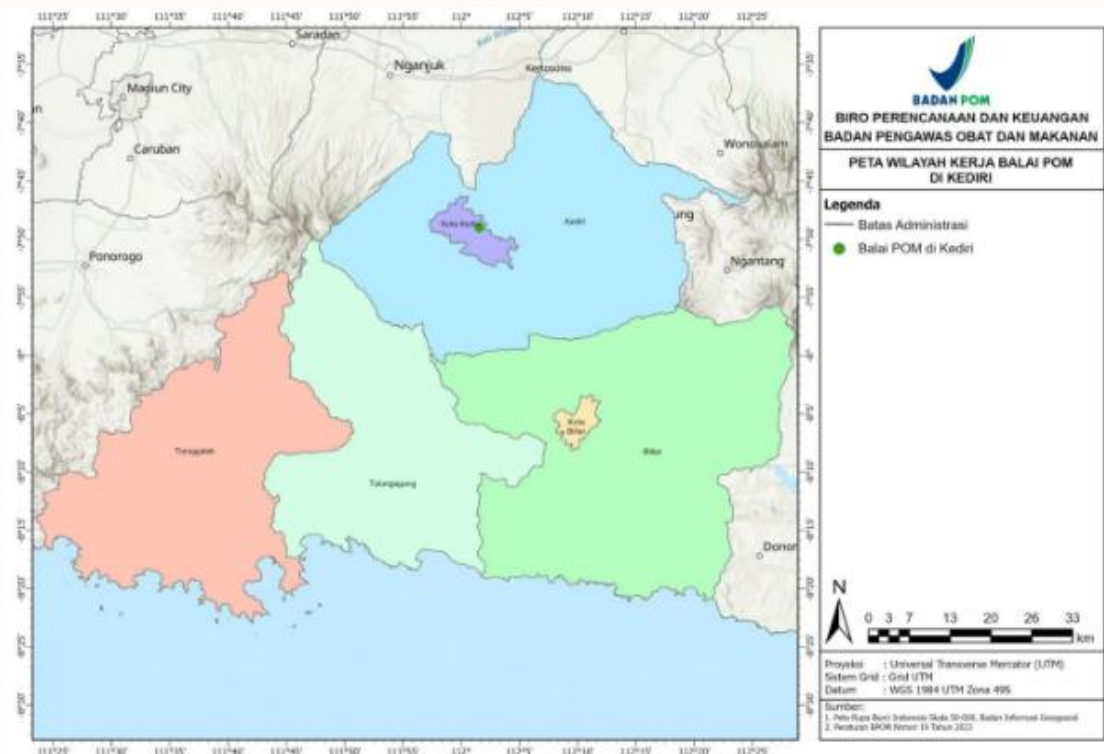
dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 3 (tiga) UPT yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, Balai POM di Kediri dan Balai POM di Jember dengan total wilayah kerja terdiri dari 38 Kabupaten/Kota. Adapun wilayah kerja Balai POM di Kediri, mencakup 6 (enam) kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar). Unit Kerja Balai POM di Kediri memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten/kota dengan luas wilayah 5.021,37 km² dan jumlah penduduk 5.265.100 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri/*BPS-Statistics Jawa Timur Province and Ministry of Home Affairs*).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Begitupun dengan Balai POM di Kediri yang bertugas dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan baik di sarana produksi maupun di peredaran/ distribusi. Total sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ada di wilayah kerja Balai POM di Kediri 7912 sarana, hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Balai

POM di Kediri untuk melindungi masyarakat dari produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan.



Gambar 1 Wilayah Kerja Balai POM di Kediri

Berdasarkan Gambar 1 tersebut, cakupan wilayah kerja UPT Balai POM di Kediri yang luas terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 2 (dua) kota mencakup 87 kecamatan dan 1087 kelurahan/desa. Dari lokasi kantor Balai POM di Kediri menuju wilayah kerjanya dapat menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2,5 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Trenggalek yaitu $\pm$ 4 jam perjalanan darat.

Tabel 1 Jarak Tempuh ke Wilayah Kerja

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	* Waktu Tempuh (jam)
1	Kabupaten Trenggalek	jam	4
2	Kabupaten Tulungagung	jam	3
3	Kabupaten Blitar	jam	3
4	Kabupaten Kediri	jam	2

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	* Waktu Tempuh (jam)
5	Kota Kediri	jam	0,5
6	Kota Blitar	jam	2

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kediri ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, yang secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Balai POM di Kediri mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai POM di Kediri menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- Menyusun rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Melaksanakan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber;

- Melaksanakan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

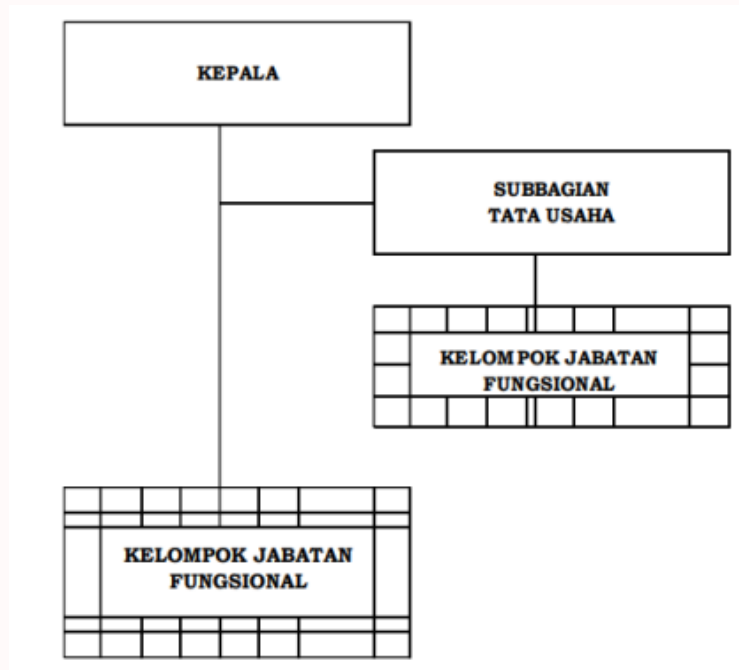
Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, Balai POM di Kediri mempunyai 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kediri;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

1.3 Struktur Organisasi

Balai POM sebagai salah satu UPT BPOM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, terdiri atas

tiga Komponen utama yaitu Kepala, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional :



Gambar 2 Struktur Organisasi UPT BPOM

- Kepala Balai POM
Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023, bahwa seluruh UPT BPOM dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai POM di Kediri dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu
- Kelompok Jabatan Fungsional
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 1 tahun 2023, jabatan fungsional adalah sekumpulan jabatan yang memiliki fungsi dan tugas terkait dengan pelayanan fungsional. Pelayanan fungsional ini didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional yang terdapat di Balai POM Kediri:
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
 - b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer

- c. Jabatan Fungsional Pengelola APBN
- d. Jabatan Fungsional SDM Aparatur

Pada tahun 2025, terdapat 6 (enam) tim kerja di Balai POM di Kediri, yakni:

1. Tim Kerja Pemeriksaan/Inspeksi;
2. Tim Kerja Sertifikasi;
3. Tim Kerja Infokom;
4. Tim Kerja Penindakan;
5. Tim Kerja Pengujian;
6. Tim Kerja Tata Usaha.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, jumlah pegawai di Balai POM di Kediri sebanyak 41 (tiga puluh tujuh) pegawai, dengan rincian 30 (dua puluh) PNS, 3 (tiga) PPPK, dan 8 (delapan) outsourcing dan terdiri dari jabatan struktural, fungsional dan pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jabatan Struktural
 - Kepala Balai POM di Kediri;
 - Kepala Subbagian Tata Usaha
2. Jabatan Fungsional
 - Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, 6 (enam) pegawai;
 - Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama 16 (enam belas) pegawai;
 - Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir 1 (satu) pegawai;
 - Pranata SDM Aparatur Mahir 1 (satu) pegawai;
 - Pranata Komputer Terampil 1 (satu) pegawai;
 - Pranata Keuangan APBN Terampil 1 (satu) pegawai;
 - Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda 1 (satu) pegawai
3. Jabatan Pelaksana
 - Penata Layanan Operasional 1 (satu) pegawai;
 - Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 1 (satu) pegawai
4. Pegawai kontrak (*outsourcing*)
 - *Front Office* 1 (satu) pegawai;
 - Arsiparis 1 (satu) pegawai;
 - Tenaga keamanan 3 (tiga) pegawai;
 - Pengemudi 1 (satu) pegawai;
 - Tenaga kebersihan 2 (dua) pegawai.

1.4 Isu Strategis

1. Isu Strategis Internal

- a. Sumber Daya Manusia Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Balai POM di Kediri

SDM yang dimiliki Balai POM di Kediri sampai dengan TW II berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang, sedangkan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja kebutuhan SDM sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang sehingga pemenuhan pegawai baru sebesar 62,26%. Hal ini berdampak pada beban kerja yang harus diselesaikan dalam satu waktu sehingga dalam perhitungan untuk mencapai 100% kinerja maka setiap pegawai harus merangkap beberapa tugas yang tidak sesuai dengan jabatan fungsionalnya.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Kediri senantiasa melakukan peningkatan kompetensi SDM dan merencanakan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Kediri perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Balai POM di Kediri juga harus mempunyai strategi pengembangan kompetensi pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Peningkatan kompetensi di bidang Teknologi Informasi harus terus diperbaharui, mengingat semakin berkembangnya penggunaan media online saat ini. Penggunaan aplikasi yang dapat mendukung dalam kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, memberikan pelayanan publik, memberikan bimbingan kepada pelaku usaha, serta mempermudah komunikasi dan pengumpulan data yang diperlukan oleh instansi terkait.

- b. Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Manajemen Mutu dalam Upaya Pembangunan Zona Integritas

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah membentuk birokrasi pemerintah yang profesional, dengan ciri-ciri yang adaptif, berintegritas, memiliki kinerja tinggi, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, birokrasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik, bersifat netral, sejahtera, berdedikasi, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara.

Pada triwulan III tahun 2025, Balai POM di Kediri akan melaksanakan

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang tepat dan profesional, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang yang diberikan.

Balai POM di Kediri menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan yang berfokus kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. Penerapan QMS ISO 9001:2015 di Balai POM Kediri diintegrasikan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan memperhatikan kesamaan dalam aspek pengendalian risiko. Secara konsisten, Balai POM di Kediri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu sebagai bagian dari lembaga tersebut. Untuk mendukung perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam penerapan sistem manajemen mutu, dilakukan evaluasi melalui audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara rutin. Balai POM di Kediri berkomitmen untuk mencegah terjadinya praktik penyuapan dalam lingkungan organisasi dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pada tahun 2024, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah mulai diimplementasikan dengan pelaksanaan pelatihan kepada seluruh karyawan untuk memahami dan menghindari potensi penyuapan, baik dalam interaksi dengan pihak internal maupun eksternal.

c. Gedung Balai POM di Kediri

Saat ini Balai POM di Kediri menempati Gedung Bangunan Kantor Arsip Milik Pemerintah Kabupaten Kediri dengan status “Pinjam Pakai” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sesuai Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Balai Besar POM di Surabaya tentang Pinjam Pakai Eks Tanah dan Gedung Bangunan Kantor Arsip Milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Kantor Balai POM di Kediri Nomor: 028/2720/418.51/2018 dan Nomor: HK.09.01.1060.10.18.10164 tanggal 11 Oktober 2018 kemudian diperpanjang sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/2906/418/51/2019 dan Nomor: KS.01.01.106.142.10.19.7689 tanggal 11 Oktober 2019 dan diperpanjang kembali sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/659/418.51/2021 dan Nomor: KS.01.01.1061.03.21.0024 dengan masa berlaku pinjam pakai selama 5 (lima) tahun.

Tahun 2024, Balai POM di Kediri mendapatkan hibah tanah dari Pemkab Kediri sesuai sertifikat Hak Pakai Tanah dengan nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI nomor 12.25.000005908.0 dengan luas 6658 m2. Sampai dengan saat ini pada lahan tersebut belum dilakukan pembangunan gedung karena adanya dampak efisiensi anggaran.

d. Layanan Pengujian Balai POM di Kediri

Laboratorium pengujian memegang peranan kunci dalam sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM, khususnya dalam mendeteksi dan memverifikasi kualitas serta keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat. Hasil pengujian yang cepat sangat dibutuhkan agar jika produk tidak memenuhi standar, dapat segera ditarik atau diambil tindakan lain untuk melindungi masyarakat dari obat yang tidak memenuhi kriteria atau yang palsu. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas pengujian Balai POM di Kediri, termasuk pemenuhan standar peralatan laboratorium yang efektif dan efisien, kompetensi sumber daya manusia, serta ruang lingkup pengujian yang sesuai.

Balai POM di Kediri telah memiliki laboratorium pengujian yang masih dalam tahap pengembangan dan pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) Laboratorium. Dalam melakukan kegiatan pengujian, sebagian sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diambil di wilayah kerja Balai POM Kediri dikirim untuk diuji di Balai Regional Pengujian yang telah ditetapkan.

2. Isu Strategis Eksternal

a. Perkembangan perizinan melalui OSS RBA yang sangat dinamis

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kediri.

Meningkatnya permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat BPOM melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Namun demikian, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini. Penundaan dalam

pemberian izin dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk obat dan pangan olahan yang dibutuhkan dan dapat mengurangi daya saing industri. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini perlu menyasar pada perbaikan efisiensi dan transparansi proses registrasi, sekaligus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa BPOM di Kediri tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam meningkatkan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BPOM di Kediri.

Perizinan OSS RBA juga mengakomodasi kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan sehingga bersifat dinamis. Setiap perubahan yang terjadi dalam perizinan tersebut memerlukan waktu dalam adaptasi dan sosialisasi sehingga diperlukan komunikasi yang berkelanjutan antara pelaksana perizinan dan pelaku usaha.

- b. Kegiatan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian bersama dengan DPMPTSP dan Dinas Kesehatan belum tersinkronisasi dengan pemeriksaan rutin Balai POM di Kediri

Koordinasi pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah dan Balai POM di Kediri telah dilaksanakan sepanjang tahun. Koordinasi terkait perencanaan dapat ditingkatkan sehingga dapat memperkuat efektifitas dan efisiensi pengawasan. Balai POM di Kediri terlibat dalam pengawasan rutin sarana pelayanan kefarmasian bersama DPMPTSP dan Dinas Kesehatan di Kota Kediri. Target pengawasan sarana pelayanan kefarmasian bersama dengan DPMPTSP dan Dinas Kesehatan Kota Kediri dapat disinkronisasi dengan pemeriksaan rutin Balai POM di Kediri. Di wilayah lain seperti Kabupaten Trenggalek Balai POM di Kediri bekerjasama dalam asistensi dan advokasi pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Sementara intensifikasi pengawasan pangan olahan di seluruh wilayah kerja telah melibatkan pemangku kepentingan di pemerintahan daerah.

- c. Harapan stakeholder dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi.

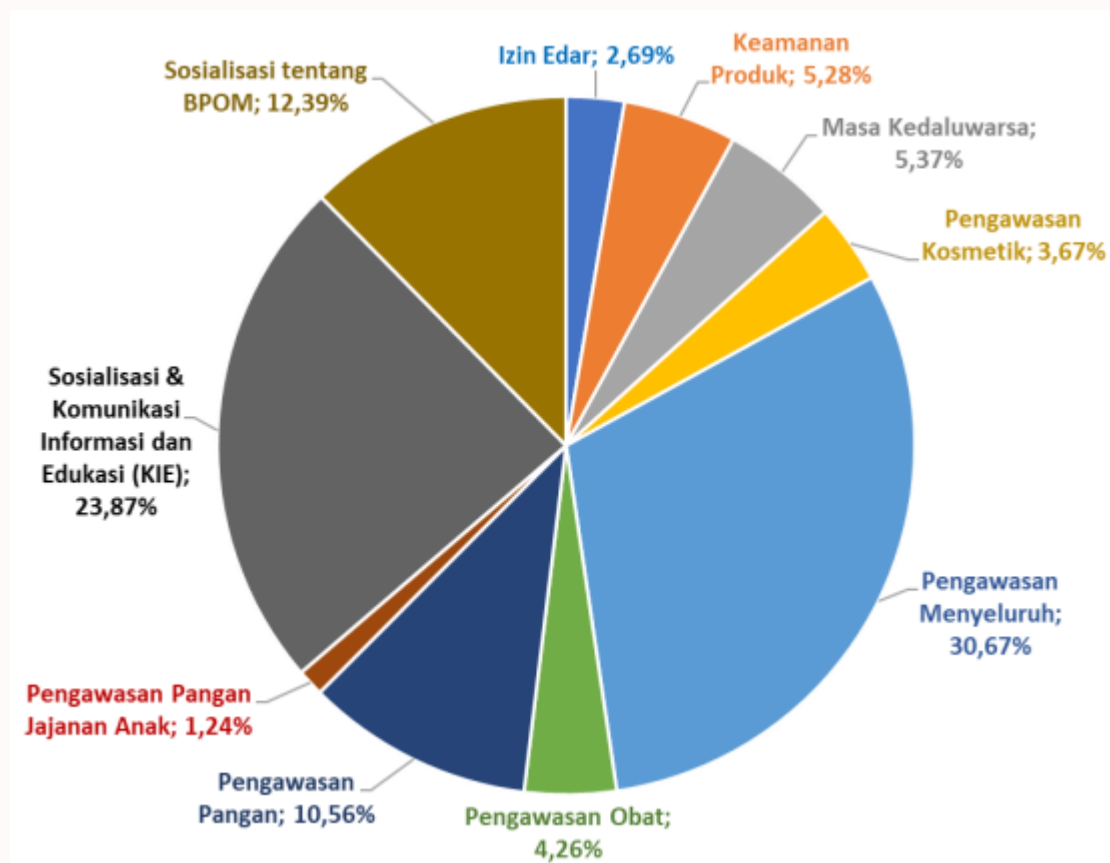
Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BPOM dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BPOM untuk merespons

secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergent, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Badan POM menjangkarkan feedback dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat di seluruh Indonesia di 38 (tiga puluh delapan) provinsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas feedback yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di

bawah ini adalah hasil analisis word cloud dari feedback dan saran masukan dari masyarakat. Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “kinerja BPOM”, “Pengawasan Produk”, dan “Sosialisasi BPOM ke Masyarakat”, serta lainnya dapat dilihat pada gambar diatas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah di klusterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan pangan.



Gambar 3 Chart Kinerja UPT

Berdasarkan hasil klusterisasi saran dan analisis *word cloud* diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah rural
2. BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat
3. BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Secara khusus dalam bidang penindakan harapan dari *Criminal Justice System* yang menjadi mitra kerja sama Balai POM di Kediri adalah penindakan

yang cepat terhadap tindak pidana pada Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Balai POM di Kediri bersama Bea Cukai juga diharapkan dapat bekerjasama dalam pengawasan pemasukan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Balai POM di Kediri juga diharapkan dapat berperan dalam organisasi profesi di daerah sehingga anggota organisasi memiliki pemahaman yang baik terkait regulasi di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Pelaku usaha berharap mendapatkan informasi dan pelayanan terkait registrasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, masyarakat secara umum mendapatkan informasi dan pelayanan terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan jurnalis mendapatkan liputan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

d. Keterbatasan UMKM dalam pemenuhan standar Cara Produksi yang Baik

Beberapa pelaku usaha yang dilakukan pendampingan sampai dengan terbitnya Sertifikat IP CPPOB tidak bersedia untuk diaudit. Hasil audit sarana tersebut sebagian besar TMK dan sarana tidak melanjutkan sampai dengan terbitnya Ijin Edar MD. Sepanjang tahun 2024 terdapat 41 (empat puluh satu) sarana yang mengajukan IP CPPOB dengan hasil 20 (dua puluh) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 21 (dua puluh satu) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Dari 21 (dua puluh satu) sarana TMK tersebut 2 (dua) di antaranya tidak melanjutkan dan tidak bersedia diaudit.

Beberapa hal yang menjadi sebabnya antara lain jenis pangan yang memang dapat didaftarkan dengan ijin PIRT, sarana yang tidak lancar dalam pemasaran, sarana kesulitan dalam proses perijinan dan sarana kesulitan dalam penyelesaian pembangunan tempat produksi yang sesuai dengan kaidah CPPOB. Sehingga solusinya perlu adanya pembinaan dan pendampingan yg berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Seiring perubahan lingkungan strategis, Badan POM dituntut untuk terus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di seluruh wilayah kerja Indonesia. Rencana kinerja Balai POM di Kediri kemudian dirumuskan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029. Renstra Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Balai POM Di Kediri diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029 tersebut menjadi bentuk kontribusi Balai POM di Kediri terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Balai POM di Kediri sebagai bagian dari UPT BPOM memiliki Visi yang sama dengan Visi dari Badan POM. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu : “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Sebagai bagian dari UPT BPOM, Balai POM di Kediri memiliki misi yang sama dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di Masyarakat dengan kolaborasi lintas sektor sehingga menciptakan system pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi Lembaga pengawas, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pengembangan industry, termasuk mendorong pertumbuhan UMKM dalam meningkatkan perekonomian nasional yang lebih kuat.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

BPOM berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan produk serta turut berperan aktif dalam pengawasan obat dan makanan

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu BPOM terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat dijangkau masyarakat dengan sistem teknologi terkini.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM

BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan yang dapat meningkatkan daya saing Perindustrian dan kemandirian bangsa

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi Masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan public

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas.

Tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Sasaran strategis ini disusun sebagai upaya untuk mengimplementasikan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Kediri dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur ataupun peluang yang dimiliki Balai POM di Kediri. Dalam kurun waktu tahun 2025-2029 ke depan diharapkan Balai POM di Kediri akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada kerangka logis kinerja (logframe) tahun 2025-2029 berikut :

Tabel 2 Sasaran Strategis Balai POM di Kediri

Sasaran Strategis	No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81.75	84.13	85.25	86.50	87.75
			2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
			3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	89	91	93	95
			4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100
			5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	92	93	94	95
			6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	98	98.5	99	99.5	100
			7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	95.67	96.33	97	97.67
			8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	92	93	94	95
			9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25	93.25	94.25	95.25	96.00
			10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
			11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang	87.97	92.40	94.00	95.60	96.80

Sasaran Strategis	No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
				Diawasi Sesuai Ketentuan					
	2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67	73	80	87	87
Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	16	19	22	25.00
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84.37	85.21	86.05	86.90	87.74
			15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	4	6	6	6	8
			16	Jumlah Desa Pangan Aman	1	2	3	3	3
			17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	1	1	1
	5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	91	33.33	53.85	76.92	100.00
	6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	82	83	84	85	86
Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang	90	91	92	93	94

Sasaran Strategis	No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
		bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Diselesaikan Sesuai Standar					
Layanan Publik yang Prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.20	4.3	4.4	4.5	4.6
Terwujudnya Organisasi dan Tatakelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.00	76.50	78.00	79.50	81.00
			23	Nilai AKIP UPT BPOM	78.55	79.30	80.05	80.80	81.55
			24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3	3	3	3

Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan

optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dimana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini menggaris bawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan *e-commerce* dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonom

5. Layanan Publik yang Prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak

6. Terwujudnya Organisasi dan Tatakelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran BPOM di Kediri pada tahun 2025 yang selaras antara Renstra 2025-2029 dengan penyusunan anggaran serta tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.1.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala BPOM di Kediri menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025 dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kediri Nomor HK.02.02.19B.19B5.09.24.142 Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	78,39
		Nilai AKIP UPT BPOM	78,18
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89,13
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Kediri menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Kediri tahun 2025-2029 dan DIPA Balai POM di Kediri Tahun Anggaran 2025.

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025. Target pada RKT Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Kediri tahun 2025-2029. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Kediri tahun 2024 terdiri atas 9 Sasaran Kegiatan yang diuraikan menjadi 25 Indikator Kinerja Kegiatan dengan pengusulan target sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2025.

Jumlah anggaran DIPA Balai POM di Kediri tahun 2025 sebesar Rp 24.253.063.000,- (Dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah). Anggaran pada Balai POM di Kediri mengalami efisiensi sesuai menjadi Rp 9.005.252.000,- (Sembilan milyar lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang seluruhnya bersumber pada Rupiah Murni (RM).

Berdasarkan anggaran tersebut di atas maka disusunlah Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Kediri, sebagai berikut :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Indikator
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81,75
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
		5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Indikator
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	98
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	87,97
		12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,37
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		16	Jumlah desa pangan aman	1
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Indikator
	efektif di wilayah kerja UPT			
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.00
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	78,55
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BPOM di Kediri sebagai unit kerja wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BPOM di Kediri) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Kediri selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi SIMETRIS *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja ini kemudian direvisi dengan menindakanjuti surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.05.25.251 tanggal 14 Mei 2025 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 dengan perubahan target pada 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
3. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
5. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulanan				Anggaran (Rupiah)
		I	II	III	IV	
1 Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81.75	81.75	81.75	81.75	15.025.000
	2 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO				26	40.122.000
	3 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	75	75	75	28.630.000
	4 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	4.458.000
	5 Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	75	75	75	74.726.000
	6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	89	92	95	98	28.630.000
	7 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	93	93	93	26.941.500
	8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	26.941.500

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Triwulanan				Anggaran (Rupiah)
				I	II	III	IV	
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25	92.25	92.25	92.25	39.513.000
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	20.070.000
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	87.97	87.97	87.97	87.97	34.410.000
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	58	61	67	67	16.071.000
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8	11	13	14	4.847.415.000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84,37	84,37	84,37	84,37	41.861.000
		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	5%	25%	70%	4	57.803.000
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	5%	35%	70%	1	39.515.000
		17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	5%	70%	100 %	1	33.372.000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	15	50	75	91	4.462.000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Triwulanan				Anggaran (Rupiah)
				I	II	III	IV	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	61	61	67.5	82	221.754.000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50	50	90	17.989.000
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT				4,2	20.405.000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM				75,00	453.126.900
		23	Nilai AKIP UPT BPOM				78,55	33.749.500
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5.0	2.868.448.000
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				3	9.813.600

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Pada tahun 2025 kategori capaian indikator kinerja menggunakan Pedoman SAKIP di Lingkungan Badan POM. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan POM, capaian indikator kinerja dalam laporan ini dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 6 Kriteria Pencapaian Indikator Tahun 2025

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	$>110\%$	
Sangat baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$= 100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$< 70\%$	

Penetapan kriteria pencapaian indikator bertujuan untuk :

1. Sebagai revidi dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini, kami uraikan mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 yang dicapai oleh Balai POM di Kediri termasuk analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi untuk perbaikan kinerja di periode mendatang.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran kinerja di Balai POM di Kediri, hal ini penting dilakukan untuk membantu organisasi mengevaluasi, mengidentifikasi efisiensi, efektifitas kegiatan, area keberhasilan dan potensi perbaikan atau penyesuaian dalam strategi demi mencapai tujuan organisasi. Capaian kinerja selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, membandingkan realisasi triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025 dan membandingkan realisasi triwulan II tahun 2025 dengan realisasi triwulan II tahun lalu. Dalam melakukan analisis, disampaikan penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja, upaya perbaikan atau rekomendasi, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta tindak lanjut rekomendasi sebelumnya.

Capaian kinerja Balai POM di Kediri diukur secara kuantitatif melalui Nilai Pencapaian Sasaran Kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja. Berikut Nilai Pencapaian Sasaran Kinerja Sampai Triwulan II 2025 Nilai Kinerja Organisasi dari Balai POM di Kediri.

Tabel 7 Pencapaian Nilai Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	NORMALISASI
SK.1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang	81,75	99,75	122,02 %	Tidak Dapat Disimpulkan	110

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	NORMALISASI
	Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Diukur akhir tahun				
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	90	120,00 %	Tidak Dapat Disimpulkan	110
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	-				
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	100	133,33 %	Tidak Dapat Disimpulkan	110
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	92	89,13	96,88	Cukup	96,88
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	100	107,53	Sangat Baik	107,53
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	98,48	123,11	Tidak Dapat Disimpulkan	110
9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92,25	94,23	102,15	Sangat Baik	102,15
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa	80	98,54	123,18	Tidak Dapat Disimpulkan	110

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	NORMALISASI
	Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	87,97	98,31	111,75	Tidak Dapat Disimpulkan	110
SK.2. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi						
12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	61	60	98,36	Cukup	98,36
SK.3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	11,87	107,90	Sangat Baik	107,90
SK.4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT						
14	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84,37	88,00	104,30	Sangat Baik	104,30
15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	25	25,00	100,00	Baik	100
16	Jumlah Desa Pangan Aman	35	35,00	100,00	Baik	100
17	Jumlah Pasar Aman Pangan berbasis Komunitas	70	70,00	100,00	Baik	100
SK.5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu						
18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat	50	73,89	147,78	Tidak Dapat Disimpulkan	110

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	NORMALISASI
	Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan					
SK.6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	61	53,75	88,11	Cukup	88,11
SK.7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	45,84	91,67	Cukup	91,67
SK.8. Layanan Publik UPT yang prima						
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Diukur Akhir Tahun				
SK.9. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal						
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Diukur Akhir Tahun				
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Diukur Akhir Tahun				
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Diukur Akhir Tahun				
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Diukur Akhir Tahun				
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata capaian PK)						103,72
Predikat NKO						Istimewa

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, 25 Indikator Kinerja Utama diperjanjikan untuk mendukung 9 Sasaran Kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target tahunan 2025 dengan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 8 Perbandingan antara target tahunan 2025 dengan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
SK.1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81,75	99,75	122,02 	Tercapai/ Melampaui
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	0	0 	Perlu Upaya keras
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	90	120,00 	Tercapai/ Melampaui
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	0	0 	Perlu Upaya keras
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	100	133,33 	Tercapai/ Melampaui
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	98	89,13	90,95 	Akan Tercapai
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	100	107,53 	Tercapai/ Melampaui
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	98,48	123,10 	Tercapai/ Melampaui
9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa	92,25	94,23	102,15 	Tercapai/ Melampaui

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
	Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan				
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	98,54	123,18 	Tercapai/ Melampaui
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	87,97	98,31	111,75 	Tercapai/ Melampaui
SK.2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi					
12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67	60	89,55 	Akan Tercapai
SK.3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	11,87	84,79 	Akan Tercapai
SK.4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT					
14	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84,37	88,00	104,302 	Tercapai/ Melampaui
15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100	25	25 	Perlu Upaya Keras
16	Jumlah Desa Pangan Aman	100	35	35 	Perlu Upaya Keras
17	Jumlah Pasar Aman Pangan berbasis Komunitas	100	70	70 	Akan Tercapai
SK.5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu					
18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	91	73,89	81,20 	Akan Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
SK.6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	82	53,75	65,55 ▼	Perlu Upaya keras
SK.7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	45,84	50,93 ▼	Perlu Upaya keras
SK.8. Layanan Publik UPT yang prima					
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20	0	0 ▼	Perlu Upaya keras
SK.9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal					
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	0	0 ▼	Perlu Upaya keras
23	Nilai AKIP UPT BPOM	78,55	0	0 ▼	Perlu Upaya keras
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0 ▼	Perlu Upaya keras
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	0	0 ▼	Perlu Upaya keras

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan realisasi Triwulan II tahun 2024

Tabel 9 Perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan realisasi Triwulan II tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TRIWULAN II			KETERANGAN
		2024	2025		
SK.1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	99,75	-	IKU Baru

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TRIWULAN II			KETERANGAN
		2024	2025		
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	Diukur Akhir Tahun		IKU Baru
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	90	-	IKU Baru
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	-	-	-	IKU Baru
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	100	-	IKU Baru
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	85	89,13		-
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	100	-	IKU Baru
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	58,33	98,48		
9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	94,23	-	IKU Baru
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	98,54	-	IKU Baru
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	-	98,31	-	IKU Baru
SK.2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi					
12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang	-	60	-	IKU Baru

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TRIWULAN II			KETERANGAN
		2024	2025		
	Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan				
SK.3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	11,87	-	Tahun 2024 diukur tahunan
SK.4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT					
14	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	91,65	88		
15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	50	25		
16	Jumlah Desa Pangan Aman	27,50	35		
17	Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas	42	70		
SK.5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu					
18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	56,67	73,89		
SK.6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	36,75	53,75		
SK.7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	-	45,84	-	IKU Baru
SK.8. Layanan Publik UPT yang prima					

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TRIWULAN II			KETERANGAN
		2024	2025		
21	Indeks Pelayanan Publik UPT		Diukur Akhir Tahun		
SK.9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal					
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		Diukur Akhir Tahun		
23	Nilai AKIP UPT BPOM		Diukur Akhir Tahun		
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		Diukur Akhir Tahun		
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		Diukur Akhir Tahun		

SASARAN STRATEGIS 1**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN
OLAHAH DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KEDIRI**

IK 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 10 Perbandingan target dan realisasi sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75 %	99,75 %	122,02 %	Tidak dapat disimpulkan

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 11 Perbandingan target tahunan dan realisasi sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,75 %	99,75 %	122,02 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 12 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 pada sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	Belum ada
	2025	81,75 %	99,75 %	122,02 %	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% = \frac{(A+B+C+D)}{4} \times 100\%$$

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan

berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan 74 sampel sediaan farmasi terdiri dari 28 sampel obat, 11 sampel obat bahan alam, 4 sampel suplemen kesehatan, dan 31 sampel kosmetik. Sampel dilakukan tindak lanjut berupa kesesuaian perencanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan pengujian, kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian, dan kesesuaian pelaporan monitoring / tanggapan atas surat dari pusat. Capaian persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 **Tercapai/Melampaui** target yaitu 122,02% dengan kriteria **"Tidak dapat disimpulkan"**.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu 122,02% (Tidak dapat disimpulkan). Faktor pendukung yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

- kesesuaian realisasi pelaksanaan sampling dengan perencanaan
- Kesesuaian pelaksanaan pengujian sampel dengan parameter ujinya
- Kesesuaian pelaporan hasil dengan kesimpulan
- Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu :

- Peningkatan koordinasi Balai POM di Kediri dengan Unit Pengampu dan Balai Penguji yang tergabung dalam Regionalisasi laboratorium
- Peningkatan kompetensi petugas melalui bimbingan teknis, Focus Group Discussion (FGD)

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 13 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 25.944.700	Rp. 19.790.951	76,28 %	122,02 %	0,60 (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,60.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 14 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Peningkatan koordinasi Balai POM di Kediri dengan Unit Pengampu dan Balai Penguji yang tergabung dalam Regionalisasi laboratorium	-	-	Sepanjang Tahun 2025	-	-

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2025 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,
2. Pemenuhan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025 dilakukan pemantauan secara berkesinambungan,
3. Pemenuhan timeline sampling dan pengujian dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan memantau capaian timeline sampling dan pengujian sesuai dengan target yang ditetapkan,
4. Kegiatan Pengujian dilakukan sesuai dengan standar untuk menjamin validitas hasil pengujian laboratorium,
5. Dilakukan koordinasi terkait sampling dan pengujian dengan balai lain yang menjadi anggota region Surabaya pada program regionalisasi,
6. Melakukan koordinasi dan pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS),

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik dapat mendorong pencapaian target tahun 2025.

IK 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 15 Perbandingan Target Dan Realisasi pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	0 %	8,89 %	-	NA

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 16 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 pada pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	26 %	8,89 %	-	Perlu Upaya keras 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 17 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	2024	-	-	-	Belum ada
	2025	26 %	-	-	N/A

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM :

$$= \frac{\text{jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM}}{\text{jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans}} \times 100\%$$

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan perhitungan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dibagi jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM. Indikator ini merupakan indikator yang baru pada tahun 2025., Capaian indikator akan diukur pada akhir tahun, sehingga capaian indikator hingga TW II belum bisa dilakukan pengukuran.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Telah dilakukan Sosialisasi terkait Farmakovigilance dan Pelaporan MESO (Monitoring Efek Samping Obat) melalui aplikasi e-MESO terhadap 45 sarana pelayanan kefarmasian yaitu Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja BPOM Kediri, sampai dengan triwulan II baru 4 sarana yang melaporkan kejadian MESO melalui e-

MESO. Dengan demikian untuk mencapai target di akhir tahun diperlukan usaha keras dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada triwulan III 2025 akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan MESO dan sinergitas dalam kegiatan pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 18 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	Rp. 5.611.000,-	Rp. 13.860.000,-	247,01 %	34,19 %	Tidak dapat diukur

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa serapan anggaran untuk indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO sudah melebihi pagu anggaran yang tersedia. Anggaran yang tersedia merupakan anggaran untuk pelaksanaan KIE Farmakovigilans pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, namun pengukuran kinerja baru bisa diukur diakhir tahun.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 19 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring Pelaksanaan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO termasuk tahapan-tahapannya	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Belum dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO	Sudah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO melalui jaringan komunikasi Whatsapp Group
2. Optimalisasi monitoring melalui sinergitas pelaksanaan pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian
3. Pemberian reward bagi sarana pelayanan kefarmasian yang rutin melaporkan KTD / ESO.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD / ESO adalah kurang dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan II ini memastikan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

IK 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 20 Perbandingan Target Dan Realisasi sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %	90 %	120,00 %	Tidak dapat disimpulkan

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 21 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 pada sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %	90 %	120,00 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 22 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 pada sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	Belum ada
	2025	75 %	90 %	120,00 %	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% = (20\% A + 20\% B + 20\% C + 10\% D + 10\% E + 20\% F)$$

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Sampel ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan cara diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling. Pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

- Kesesuaian target sampel UPT
- Kesesuaian parameter uji
- Ketepatan pengambilan Kesimpulan
- Ketepatan waktu pengambilan sampel
- Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- Sampel ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya apabila terdapat sampel tanpa izin edar (TIE) maupun tidak memenuhi syarat (TMS).

Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II diperoleh dari hasil pemeriksaan 31 sampel pangan olahan. Belum terdapat sampel TMS pada triwulan II sehingga evaluasinya dilakukan sampai tahapan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian. Capaian persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 **Tercapai / Melampaui** target yaitu 120,00% dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 120,00% (Tidak dapat disimpulkan). Realisasi ini diperoleh dengan cara melaporkan kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan menggunakan tools self assesment yang disediakan oleh pusat. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan sejak perencanaan sampling sampai dengan pelaporan sampling. Kesesuaian dan ketepatan pada pelaksanaan setiap tahapan menjadi komponen yang masuk ke dalam rumus perhitungan sehingga kedua hal tersebut harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Pada triwulan II tahun 2025, Balai POM di Kediri belum melakukan pengujian sampel pangan olahan secara mandiri sehingga poin A hanya sebesar 50% dari komponen angka 20% yaitu sebesar 10% sehingga realisasi capaiannya di angka 90%.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu kegiatan pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan (Renlak) sampling yang telah disusun berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Kedeputan 3 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya update informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling serta koordinasi melalui grup percakapan antara BPOM pusat dengan UPT BPOM. Terdapat pula komunikasi yang baik antara petugas Balai POM di Kediri dengan Balai Penguji yang tergabung dalam Regionalisasi laboratorium. antar UPT BPOM baik itu Loka POM, Balai POM dan Balai Besar POM terdapat grup whatsapp yang memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait sampling dan pengujian

secara regionalisasi laboratorium mengingat sampling memiliki proses bisnis yang cukup kompleks karena mempertimbangkan banyak variabel aspek seperti aspek kemampuan laboratorium dalam menguji (ketersediaan metode analisis, alat, reagensia, dan sumber daya manusia), lokasi laboratorium Balai POM yang akan menguji (memerlukan pengiriman sampel) dan parameter uji tertentu yang harus dipertimbangkan (uji kimia, uji mikro, dan uji kajian).

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 23 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 8.843.640	Rp. 6.460.770	73,06 %	90 %	0,64 (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,64.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 24 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Terdapat movev sampling dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan untuk melakukan sampling produk yang diproduksi secara lokal di wilayah kerja Balai POM di Kediri dan berpotensi		Koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran pangan olahan terkait sampling pangan olahan yang direkomenda sikan untuk diakomodir di bulan	Mei 2025	Sampel pangan olahan yang diproduksi oleh produsen di wilayah kerja Balai POM di Kediri belum banyak yang masuk ke dalam analisis risiko untuk disampling di tahun 2025	Terdapat beberapa produk pangan olahan dari produsen di wilayah kerja Balai POM di Kediri yang menjadi prioritas untuk disampling berdasarkan analisis risiko potensi TMS / memiliki riwayat TMS.

	TMS/memiliki riwayat TMS berdasarkan analisis risiko		sampling tertentu			
--	--	--	-------------------	--	--	--

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2025 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,
2. Pemenuhan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025 dilakukan pemantauan secara berkesinambungan,
3. Pemenuhan timeline sampling dan pengujian dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan memantau capaian timeline sampling dan pengujian sesuai dengan target yang ditetapkan,
4. Kegiatan Pengujian dilakukan sesuai dengan standar untuk menjamin validitas hasil pengujian laboratorium,
5. Dilakukan koordinasi terkait sampling dan pengujian untuk sampel tertentu dan/atau parameter uji spesifik dengan balai lain yang menjadi anggota region Surabaya pada program regionalisasi,
6. Melakukan koordinasi dan pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik dapat mendorong pencapaian target tahun 2025.

IK 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar**a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025***Tabel 25 Perbandingan Target Dan Realisasi sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan II tahun 2025*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %	-	-	NA

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025*Tabel 26 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 pada sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %	-	-	Perlu Upaya Keras 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024*Tabel 27 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar*

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	2024	-	-	-	NA
	2025	100 %	-	-	NA

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% = \frac{(30\% \times A1, A2 \dots An) + (35\% \times B1, B2 \dots Bn) + (35\% \times C1, C2 \dots Cn)}{n}$$

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L)

Sampel KLB diuji sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan Dalam Kemasan juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dilakukan perhitungan meliputi :

- A. Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%
- B. Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%
- C. Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tidak terdapat realisasi pada triwulan II, dikarenakan pada triwulan II terdapat 2 (dua) kasus keracunan pangan dari pangan siap saji, namun tidak dilaporkan sebagai kasus KLB keracunan pangan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Balai POM di Kediri. Dari kasus keracunan pangan tersebut, tidak dilakukan pengambilan dan pengujian sampel pangan oleh Badan POM, pengujian sampel muntahan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah setempat. Kasus tersebut telah dilaporkan pada aplikasi SPIMKER, dan terus dilakukan pemantauan di grup percakapan KLB KP maupun koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Lintas Sektor terkait. Sehingga capaian persentase sampel sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2025 **tidak ada capaian** dan dikeluarkan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan karena tidak terdapat realisasi. Hal ini disebabkan karena kasus keracunan pangan yang terjadi, tidak ditetapkan statusnya sebagai Kejadian Luar Biasa oleh Pemerintah Daerah setempat, serta tidak dilakukan pengambilan dan pengujian sampel keracunan pangan tersebut oleh Balai POM di Kediri, karena sampel pangan siap saji dan sampel muntahan diambil

oleh Dinas Kesehatan. Balai POM di Kediri membuat laporan kasus KLB keracunan pangan ke BPOM pusat dengan laporan nihil sampel KLB yang diuji. Pelaporan kasus KLB keracunan pangan dibuat secara periodik setiap triwulan sebagai tindak lanjut atas ada/tidak nya kasus KLB. Laporan tersebut ditujukan pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sehingga Direktorat pangampu kegiatan ini mendapatkan laporan atas ada / tidak nya kejadian KLB keracunan pangan di masing-masing UPT. Upaya perbaikan kinerja dilakukan dengan optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor agar informasi kejadian keracunan pangan diperoleh lebih cepat sehingga dapat terlibat dalam pengambilan sampel keracunan pangan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar yaitu monitoring secara berkala aplikasi Sistem Pelaporan Masyarakat Keracunan (SPIMKer) dan koordinasi melalui grup percakapan antara BPOM pusat dan UPT terkait adanya kasus KLB keracunan pangan di setiap wilayah di Indonesia sehingga Balai POM di Kediri dapat secara cepat mendeteksi adanya laporan terkait kejadian KLB keracunan pangan di wilayah kerjanya. Koordinasi dan komunikasi yang baik terus dilakukan Balai POM di Kediri dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota di wilayah kerja untuk memantau apakah terjadi kasus KLB keracunan pangan.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 28 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Rp. 1.473.940	Rp. 1.076.795	73,06 %	-	-1,00 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran sudah tercapai cukup optimal yaitu 73,06%, namun capaian indikator tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena tidak ada capaian. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah Tidak Efisien dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar -1,00.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 29 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Perlu dilakukan koordinasi dengan Direktorat pengampu terkait pelaksanaan bimtek / <i>refreshment</i> untuk meningkatkan / menjaga kompetensi petugas	koordinasi dengan Direktorat pengampu terkait pelaksanaan bimtek / <i>refreshment</i> untuk meningkatkan / menjaga kompetensi petugas		TW II	Belum dilakukan koordinasi dengan Direktorat pengampu terkait pelaksanaan bimtek / <i>refreshment</i> untuk meningkatka n / menjaga kompetensi petugas	Direktorat pengampu memberikan bimtek / <i>refreshment</i> untuk meningkatkan / menjaga kompetensi petugas.
2	Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan di wilayah kerja Balai POM di Kediri agar lebih cepat mendeteksi kejadian KLB sehingga memungkinkan untuk terlibat dalam pengambilan sampel KLB.	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan di wilayah kerja Balai POM di Kediri untuk percepatan mendeteksi kejadian KLB	TW III	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan di wilayah kerja Balai POM di Kediri dalam mendeteksi kejadian KLB kurang cepat	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan di wilayah kerja Balai POM di Kediri dalam mendeteksi kejadian KLB dapat lebih cepat

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat pengampu terkait adanya kasus KLB KP, penanganan dan pelaporan kasus KLB KP di Balai POM Kediri,

2. Melakukan koordinasi dengan pengujian di Balai Besar POM di Surabaya apabila dalam penanganan kasus KLB KP memerlukan uji di Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tidak mencapai target karena tidak ada capaian realisasi, dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian target berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik dapat mendorong pencapaian target tahun 2025.

IK 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %	100 %	133,33 %	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 30

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 31 Perbandingan Target Tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %	100 %	133,33 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 32 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	NA
	2025	75 %	100 %	133,33 %	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\% = (20\% A + 20\% B + 20\% C + 10\% D + 10\% E + 20\% F)$$

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Sampel ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan cara diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling. Pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

- Kesesuaian target sampel UPT
- Kesesuaian parameter uji
- Ketepatan pengambilan Kesimpulan
- Ketepatan waktu pengambilan sampel
- Ketepatan waktu pelaporan
- Sampel ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya apabila terdapat sampel tanpa izin edar (TIE) dan/atau rusak dan/atau kedaluwarsa dan/atau tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian.

Pada tahun 2025, kegiatan sampling seluruh sampel PIRT hanya dilakukan sampai dengan triwulan I saja. Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan 6 sampel PIRT. Pada saat sampling, terdapat 1 sampel PIRT tanpa izin edar (TIE) karena masa berlaku izinnya sudah habis dan pelaku usaha tidak melakukan perpanjangan izin. Sampel tersebut telah dilakukan tindak lanjut sesuai pedoman. Untuk 5 sampel PIRT lainnya dilakukan pengujian sesuai pedoman sampling di laboratorium. Capaian persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 **Tercapai/Melampaui** target yaitu 133,33% dengan kriteria "**Tidak dapat disimpulkan**".

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 133,33% (Tidak dapat disimpulkan). Realisasi ini diperoleh dengan cara melaporkan kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan menggunakan *tools self assesment* yang disediakan oleh pusat. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan sejak perencanaan sampling sampai dengan pelaporan sampling. Kesesuaian dan ketepatan pada pelaksanaan setiap tahapan menjadi komponen yang masuk ke dalam rumus perhitungan sehingga kedua hal tersebut harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Untuk sampel yang memerlukan tindak lanjut dilakukan tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu kegiatan pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan (Renlak) sampling yang telah disusun berdasarkan standar atau pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Kedeputan 3 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling serta koordinasi melalui grup percakapan antara BPOM pusat dengan UPT BPOM.

Balai POM di Kediri belum bisa melakukan pengujian secara mandiri sehingga pengujian dilakukan oleh Balai penguji dalam hal ini dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Komunikasi yang baik antara petugas Balai POM di Kediri dengan petugas Balai Besar POM di Surabaya melalui grup percakapan akan memudahkan koordinasi

terkait sampling dan pengujian sehingga dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 33 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 4.421.820	Rp. 3.230.385	73,06 %	133.33 %	0,83 (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,83.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 34 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Terdapat desk perubahan target tahunan untuk indikator kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan terkait perubahan target tahun 2025	TW II	Target tahunan ditetapkan pada awal tahun 2025 sebesar 75%	Target tahunan mengikuti keputusan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan Biro Perencanaan dan Keuangan

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2025 dengan jumlah sesuai target yang direncanakan,

2. Pemenuhan Parameter Uji Kritis (PUK) sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025 dilakukan pemantauan secara berkesinambungan,
3. Pemenuhan timeline sampling dan pengujian dilakukan secara berkala, untuk mengukur dan memantau capaian timeline sampling dan pengujian sesuai dengan target yang ditetapkan,
4. Kegiatan Pengujian dilakukan sesuai dengan standar untuk menjamin validitas hasil pengujian laboratorium,
5. Melakukan koordinasi dan pelaporan kepada direktorat terkait atas hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian target berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik dapat mendorong pencapaian target tahun 2025

IK.6 Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 35 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92 %	89,13 %	96,88 %	Cukup

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 36 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98 %	89,13 %	90,95 %	Akan Tercapai 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 37 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	2024	85	85	100 %	Baik
	2025	98 %	89,13 %	90,95 %	Cukup

Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder :

$$= \frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti pelaku usaha dan lintas sektor}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan}} \times 100\%$$

Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan. Perhitungan pada tahun 2025 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Terdapat 41 dari 50 rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan tingginya persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. Untuk meningkatkan capaian indikator ini perlu dilakukan monitoring persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat monitoring surat tindak lanjut dan surat masuk melalui Data Pemeriksaan oleh penanggungjawab masing-masing komoditi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja serta komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan serta pelaku usaha yang dilakukan pengawasan sarana.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 38 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Rp. 6.750.000	Rp. 24.936.000	369,42 %	90,95 %	-0,74 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa serapan anggaran untuk indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sudah melebihi RPD yang ditetapkan namun capaian indikator yang masih rendah mengakibatkan penggunaan anggaran tidak efisien dengan Tingkat Efisiensi sebesar -0,74.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 39 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

1	Monitoring Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Belum dilaksanakan Monitoring Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Sudah dilaksanakan Monitoring Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
---	--	---	---------------------------	------------------	---	---

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Monitoring Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
2. Melakukan revisi anggaran untuk memenuhi perencanaan anggaran di triwulan III dan IV tahun 2025.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah akan tercapai dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan II ini memastikan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

IK 7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 40 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93 %	100 %	107,53 %	Sangat Baik

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 41 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93 %	100 %	107,53%	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 42 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	93 %	100 %	107,52 %	Sangat Baik

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan} / \text{Jumlah sasaran dan cakupan target renlak}) \times 100\%$
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun} / \text{jumlah target tahunan}) \times 100\%$
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut = rata-rata persentase sub aspek 1-6
 - 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
 - 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
 - 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
 - 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
 - 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
 - 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target sesuai renlak}) \times 100\%$
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$

- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi : Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit), Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan dan Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Realisasi persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari presentase capaian pemeriksaan sarana produksi dilakukan oleh Balai POM di Kediri, dengan hasil 100%. Capaian persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 **Melampaui** target yaitu 107,53% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 107,53% (Sangat Baik).

Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan (Renlak) yang disusun di awal tahun, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan serta melakukan evaluasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan serta memonitoring CAPA (Tindakan Pencegahan dan Perbaikan) yang dilakukan oleh pelaku usaha.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan kartu kendali pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan target yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 1 dan Kedeputian 2 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan melakukan monitoring serta evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi serta monitoring CAPA pelaku usaha dalam memenuhi hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 43 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 9.474.000	Rp. 10.457.944	110,39 %	107,52 %	-0,03 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar -0,03 karena adanya blokir anggaran di triwulan I sehingga ada pelaksanaan kegiatan di triwulan I yang akhirnya dilaksanakan di triwulan II tanpa serapan anggaran.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 44 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring entry hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi melalui SIPT dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan serta CAPA	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Monitoring entry pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi melalui SIPT kurang optimal	Sudah dilaksanakan Monitoring entry pemeriksaan sarana produksi melalui SIPT serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan (Renlak) tahun 2025;
2. Penetapan target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi berdasarkan pembobotan faktor resiko hasil pemeriksaan tahun sebelumnya;
3. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi agar sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan sarana produksi sediaan farmasi;
4. Monitoring entry hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi ke SIPT agar tepat waktu;
5. Mengejar target di triwulan sebelumnya belum tercapai agar tetap tercapai dan dilakukan monitoring serta evaluasi untuk melihat efektifitas pelaksanaannya.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masuk kategori Sangat Baik dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan

evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan II ini telah meningkatkan realisasi kinerja sebesar 107,52% jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan IV tahun 2024 yaitu sebesar 88,61%.

IK 8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 45 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80 %	98,48 %	123,10 %	Tidak Dapat Disimpulkan

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 46 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80 %	98,48 %	123,10%	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 47 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	2024	70 %	58,33 %	83,32 %	Cukup
	2025	80 %	98,48 %	123,1 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = **Rata-rata (A+B)**

- A. Jumlah sarana diperiksa = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{Jumlah target}) \times 100\%$
- B. Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Rata-rata (a+b+c)
 - a. Ketepatan waktu
 - b. Ketepatan tindak lanjut
 - c. Ketepatan koordinasi

Sarana produksi (Sarprod) Pangan Olahan yaitu meliputi : Sarana Produksi Pangan Olahan dan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Realisasi persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari presentase capaian pemeriksaan sarana produksi dilakukan oleh Balai POM di Kediri, dengan hasil 98,48%. Capaian persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 **Melampaui** target yaitu 123,1% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan yaitu 123,1% (Tidak Dapat Disimpulkan).

Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan (Renlak) yang disusun di awal tahun, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan serta melakukan evaluasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan serta memonitoring CAPA (Tindakan Pencegahan dan Perbaikan) yang dilakukan oleh pelaku usaha.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan kartu kendali pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan dan target yang telah ditetapkan oleh Kedeputian 3 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan dan melakukan monitoring serta evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi serta monitoring CAPA pelaku usaha dalam memenuhi hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 48 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 9.474.000	Rp. 10.457.944	110,39 %	123,1 %	0,12 (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasii anggaran yang melebihi RPD TW II telah tercapai, dengan capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,12. Hal ini dikarenakan adanya blokir anggaran di triwulan I sehingga ada pelaksanaan kegiatan di triwulan I yang akhirnya dilaksanakan di triwulan II tanpa serapan anggaran.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 49 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring entry hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan melalui SIPT dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan serta CAPA	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Monitoring entry pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan melalui SIPT kurang optimal	Sudah dilaksanakan monitoring entry pemeriksaan sarana produksi pangan oahan melalui SIPT serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan (Renlak) tahun 2025;
2. Penetapan target pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan berdasarkan pembobotan faktor resiko hasil pemeriksaan tahun sebelumnya;
3. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi agar sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan sarana produksi Pangan Olahan;
4. Monitoring entry hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi ke SIPT agar tepat waktu;
5. Mengejar target di triwulan sebelumnya belum tercapai agar tetap tercapai dan dilakukan monitoring serta evaluasi untuk melihat efektifitas pelaksanaannya.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masuk kategori Tidak Dapat Disimpulkan karena target di awal terlalu kecil dan ketika ada pembukaan blokir anggaran capaian melonjak secara drastis dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di

Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan II ini telah meningkatkan realisasi kinerja sebesar 123,10% jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan IV tahun 2024 yaitu sebesar 88,61%.

IK.9 Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 50 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025 fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,25 %	94,23 %	102,15 %	Sangat Baik

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 51 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,25 %	94,23 %	102,15 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 52 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi	2024	-	-	-	-

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	92,25 %	94,23 %	102.15 %	Sangat Baik

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

$$= \frac{A+B+C}{3} \times 100\%$$

- Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b)

- Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B)

- Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

- A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

- b. Kesesuaian Tindaklanjuti

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan

- Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- . Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
 - a. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
 - b. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
 - c. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$
 - A. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
 - = Rata-rata $(a+b+c+d)$
 - . Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan sesuai renlak}) \times 100\%$.
 - . Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$.
 - . Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$.
 - . Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$
- Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan rata-rata dari persentase sarana distribusi obat, obat bahan alam dan kosmetika yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Definisi indikator pengawasan sarana distribusi pada tahun 2025 sedikit berbeda dengan indikator pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dikomparasikan secara langsung.
- d. **Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Seluruh komponen perhitungan indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan kegiatan yang dapat diintervensi. Untuk mencapai target tersebut diperlukan kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan ketentuan. Pemahaman petugas terhadap ketentuan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja indikator serta ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan sediaan farmasi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat monitoring kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan melalui Data Pemeriksaan yang membantu menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 53 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II 2025	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 10.431.125	Rp. 15.075.000,-	144,52 %	102,15 %	-0,29 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran yang digunakan melebihi target RPD TW II yang direncanakan lebih besar dari capaian indikator. Tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar -0,29 karena adanya blokir anggaran di triwulan I sehingga ada pelaksanaan kegiatan di triwulan I yang akhirnya dilaksanakan di triwulan II.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 54 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Belum dilaksanakan Monitoring Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sudah dilaksanakan Monitoring Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan monitoring persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Melakukan penyegaran materi terkait ketentuan pemeriksaan dan tindak lanjut fasilitas distribusi sediaan farmasi.
3. Monitoring dan evaluasi tenggat waktu pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan sediaan farmasi

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator fasilitas distribusi sediaan farmasi adalah tercapai/melampaui dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Monitoring yang

telah dilakukan disepanjang triwulan II ini memastikan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

IK.10 Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 55 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %	98,54 %	123,18 %	Tidak dapat disimpulkan

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 56 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %	98,53 %	123,18 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 57 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	80 %	98,53 %	123,18 %	Tidak dapat disimpulkan

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

$$= A + B + C \times 100\%$$

$$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan penjumlahan dari 3 (tiga) komponen yaitu jumlah sarana yang diperiksa, jumlah sarana yang ditindaklanjuti dan jumlah sarana yang dilaporkan tepat waktu. Definisi indikator pengawasan sarana distribusi pada tahun 2025 sedikit berbeda dengan indikator pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dikomparasikan secara langsung.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Seluruh komponen perhitungan indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan kegiatan yang dapat diintervensi. Untuk mencapai target tersebut diperlukan kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan ketentuan. Pemahaman petugas terhadap ketentuan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja indikator.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat monitoring kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan melalui Data Pemeriksaan yang membantu menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 58 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp. 3.140.000	Rp. 8.335.000	265,45 %	123,18 %	-0,54 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa serapan anggaran untuk indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah melebihi RPD TW II. Karena adanya blokir anggaran di triwulan I sehingga ada pelaksanaan kegiatan di triwulan I yang akhirnya dilaksanakan di triwulan II. Terdapat kebijakan efisiensi yang mempengaruhi serapan anggaran pada TW II secara keseluruhan. Tingkat efisiensi kinerja pada Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar -0,54

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 59 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Belum dilaksanakan Monitoring Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sudah dilaksanakan Monitoring Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan monitoring persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
2. Melakukan penyegaran materi terkait ketentuan pemeriksaan dan tindak lanjut fasilitas distribusi pangan olahan;
3. Monitoring dan evaluasi tenggat waktu pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi pangan olahan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator fasilitas distribusi sediaan farmaspangan olahan adalah tercapai/melampaui dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan II ini memastikan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.

IK 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 60 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,97 %	98,31 %	111,75 %	Tidak Dapat Disimpulkan

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 61 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,97 %	98,31 %	111,75 %	Tercapai/ Melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 62 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	2024	-	-	-	Tidak ada target
	2025	87,97 %	98,31 %	111,75 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 62

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan =
Rata-rata (A+B+C+D)

A. % Iklan Obat = Rata-rata (a+b)

- (Jumlah Iklan Obat yang diawasi / Jumlah target Iklan Obat yang diawasi) x 100%
- (Jumlah iklan obat yang dilaporkan tepat waktu/jumlah target iklan obat yang diawasi) x 100%

B. % Iklan Kosmetik = Rata-rata (a+b)

- Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Rata-rata ([Realisasi iklan di media online/target iklan di media online]x100%+[Realisasi iklan di media luar ruang/target iklan di media luar ruang]x100%+[Realisasi iklan di media elektronik/target iklan di media elektronik]x100%+[Realisasi iklan di media cetak/target iklan di media cetak]x100%)
- Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = Rata-rata (i+ii)
 - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / Jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
 - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / Jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

B. % Iklan OBA = Rata-rata (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/jumlah target iklan yang diawasi)x100%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/jumlah target iklan yang diawasi)x100%

- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

$$\text{C. \% Iklan SK} = \text{Rata-rata } (a+b+c)$$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
- b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

$$\text{D. Iklan PO} = (a+b)$$

- a. Pemenuhan Target Iklan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 40$
- b. Kesesuaian Proporsi Media Iklan = $\text{Rata-rata } ((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
- c. Ketepatan waktu pelaporan iklan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

Iklan Sediaan Farmasi yaitu meliputi : Iklan Obat, Obat bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Iklan Pangan Olahan meliputi Iklan Pangan Olahan dan Iklan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Realisasi persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM di Kediri, dengan hasil 111,75 %. Capaian persentase Iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 **Melampaui** target yaitu 111,75 % dengan kriteria **“Tidak dapat Disimpulkan”**.

- d. **Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi persentase Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 melewati target yang ditetapkan yaitu 111,75 % (Tidak Dapat Disimpulkan).

Pelaksanaan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan (Renlak) yang disusun di awal tahun, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan serta melakukan evaluasi dan monitoring entry data di SIPT. Karena adanya pembukaan blokir anggaran di triwulan II yang menyebabkan capaian Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melampaui target yang ditetapkan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Iklan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan yaitu kegiatan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kedeputan 1, 2 dan 3 BPOM. Selain itu BPOM Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta melakukan monitoring serta evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan iklan serta monitoring entry data pengawasan iklan di SIPT.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 63 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Rp. 11.357.000	Rp. 1.770.000	10,37 %	111,75 %	9,78 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase Iklan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah **Tidak Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 9,78 karena adanya pembukaan blokir anggaran namun tidak diikuti dengan serapan anggaran yang optimal sehingga capaian melebihi target namun anggaran masih kecil realisasinya.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 64 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring entry hasil pengawasan iklan melalui SIPT	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Monitoring entry pengawasan iklan melalui SIPT kurang optimal	Sudah dilaksanakan Monitoring entry pengawasan iklan melalui SIPT

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan (Renlak) tahun 2025;
2. Penetapan media pengawasan iklan sesuai target dari Kedeputian 1, 2 dan 3;
3. Monitoring entry hasil pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ke SIPT agar tepat waktu.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan masuk kategori Tidak Dapat Disimpulkan dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan sesuai dengan target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan II ini telah meningkatkan realisasi kinerja sebesar 111,75 %.

SASARAN STRATEGIS 2**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI****IK 12. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan****a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025***Tabel 65 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	61 %	60 %	98,36 %	Cukup

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025*Tabel 66 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67 %	60 %	89,55 %	Akan Tercapai 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024*Tabel 67 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	2024	-	-	-	NA
	2025	67 %	60 %	89,55 %	Cukup

Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (Jumlah sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa / Jumlah sarana produksi Pangan Fortifikasi yang ada) x 100%

Sarana produksi (Sarprod) Pangan Fortifikasi yaitu meliputi : Sarana Produksi Pangan jenis Tepung Terigu, Garam Beryodium dan Minyak Goreng. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Realisasi persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh Balai POM di Kediri dibagi dengan jumlah sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang ada di wilayah kerja Balai POM Kediri, dengan hasil 98,36 %. Capaian persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 **Belum Tercapai** target yaitu 89,55 % dengan kriteria “**Cukup**”.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 belum tercapai target yang ditetapkan yaitu 89,55 % (Cukup).

Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan (Renlak) yang disusun di awal tahun, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan serta melakukan evaluasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan serta memonitoring CAPA (Tindakan Pencegahan dan Perbaikan) yang dilakukan oleh pelaku usaha namun banyaknya sarana produksi pangan fortifikasi yang tutup atau berhenti beroperasi mengakibatkan capaian belum optimal.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dan sampling produk Pangan Fortifikasi yang dihasilkan oleh sarana produksi sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan kartu kendali pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dan target yang telah ditetapkan oleh Kedeputan 3 BPOM. Selain itu BPOM

Pusat dan UPT BPOM intens melakukan komunikasi terkait adanya *update* informasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dan melakukan monitoring serta evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi serta monitoring CAPA pelaku usaha dalam memenuhi hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 68 Analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Rp. 13.983.000	Rp. 7.244.000	51,81 %	89,55 %	0,90 (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah **Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,90 karena adanya pemblokiran anggaran pada awal tahun sehingga ada kegiatan yang tidak menyerap anggaran.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 69 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal dan eksternal) sebelumnya pada sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Monitoring entry hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui SIPT dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan serta CAPA	-	Sesuai dengan rekomendasi	Akhir tahun 2025	Monitoring entry pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui SIPT kurang optimal	Sudah dilaksanakan Monitoring entry pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui SIPT serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan (Renlak) tahun 2025;
2. Penetapan target pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi berdasarkan pembobotan faktor resiko hasil pemeriksaan tahun sebelumnya;
3. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi agar sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan sarana produksi Pangan Fortifikasi;
4. Monitoring entry hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi ke SIPT agar tepat waktu.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masuk kategori Cukup dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan sesuai dengan target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan II ini menurunkan realisasi kinerja menjadi sebesar 89,55%.

SASARAN STRATEGIS 3**MENGUATNYA LABORATORIUM PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT****IK 13. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium****a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025***Tabel 70 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025 nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00 %	11,87 %	107,91 %	Sangat Baik

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025*Tabel 71 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 %	11,87 %	84,79 %	Akan Tercapai 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024*Tabel 72 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium*

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2024	-	-	-	NA
	2025	11 %	11,87 %	107,91 %	Sangat Baik

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium merupakan upaya Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/ Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan pada tahun 2025 TW II 11,87% dengan target TW II 11% sehingga capaian pada TW II 107,91%.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Indikator Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, capaian sudah sesuai dengan target. Hal ini merupakan hasil penilaian dari PPOMN sebagai unit pengampu yang dilakukan secara periodik. Faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah Balai POM di Kediri telah memiliki laboratorium pengujian level 2. Sebagai upaya untuk peningkatan kinerja diperlukan:

- Pemenuhan Keterbatasan instrumen/ alat laboratorium di Balai POM Kediri
- Pemenuhan ruang uji serta ruang instrumen di Balai POM Kediri
- Peningkatan kemampuan/kompetensi penguji di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai POM di Kediri khususnya fungsi pengujian telah melakukan beberapa kegiatan atau program yang bertujuan untuk mendorong keberhasilan pencapaian kinerja. Kegiatan tersebut diantaranya:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kemampuan laboratorium;
2. Peningkatan kompetensi personel sesuai dengan standar kemampuan laboratorium.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 73 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Rp. 1.317.403.080	Rp. 1.369.377.769	103,95%	107,91 %	0,04 (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah **Efisien**, dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,04.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 74 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Membuat Perencanaan Pelatihan untuk pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium Sesuai dengan kebutuhan standar kompetensi laboratorium	TW III	Belum adanya perencanaan kebutuhan kompetensi	Sudah adanya perencanaan kebutuhan kompetensi
2	Melakukan Pemenuhan Laboratorium		Melakukan perencanaan verifikasi	TW III	Belum dilakukan verifikasi	Sudah dilakukan perencanaan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		metode untuk pemenuhan standar ruang lingkup pengujian sesuai standar kemampuan laboratorium		metode analisis	verifikasi metode analisis

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemenuhan standar ruang lingkup sesuai dengan Standar Kebutuhan Laboratorium;
2. Melaksanan pemenuhan standar peralatan sesuai dengan Standar Kebutuhan Laboratorium;
3. Melaksanakan pemenuhan kompetensi sesuai dengan Standar Kebutuhan Laboratorium.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil indikator persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Kediri Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium masuk kategori Sangat baik dan untuk indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik. BPOM di Kediri selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Monitoring yang telah dilakukan disepanjang triwulan II ini telah tercapai capaian kinerja 107,90 %.

SASARAN STRATEGIS 4**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING - MASING WILAYAH KERJA UPT****IK.14 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT****a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025***Tabel 75 Perbandingan target triwulan I dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	84,37	88,00	104,30	Sangat Baik

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025*Tabel 76 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	84,37	88,00	104,30	Tercapai/ melampaui 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024*Tabel 77 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT*

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	2024	92,80 %	91,65 %	98,76%	Cukup
	2025	84,37%	88,00%	104,30%	Sangat baik

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE

melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa wawancara tatap muka, penyebaran kuisioner, dan survei daring.

Kategori hasil penilaian indeks efektivitas KIE adalah:

Tabel 78 Kategori hasil penilaian indeks efektivitas KIE

Skor indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Realisasi capaian tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan II pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan II pada tahun 2024. Perbedaan dalam realisasi Triwulan II pada tahun 2025 dan tahun 2024 disebabkan adanya perbedaan jumlah responden. Responden pada tahun 2024 sebanyak 103 responden dan pada tahun 2025 sebesar 95 responden. Selain jumlah responden, metode KIE pada tahun 2024 dan 2025 sedikit berbeda yaitu penggunaan media *online* dan *offline*.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Indikator Indeks Efektivitas KIE Balai Besar POM di Kediri sudah memperoleh hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini merupakan hasil penilaian dari Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit pengampu yang dilakukan secara periodik. Kegiatan KIE Balai POM di Kediri yang direncanakan pada triwulan II adalah KIE sosialisasi langsung dan melalui media sosial. Kegiatan penyebaran informasi secara

sosialisasi langsung yang dilaksanakan pada triwulan II antara lain KIE yang bekerjasama dengan stakeholder di wilayah Balai POM di Kediri.

Indeks efektivitas KIE pada triwulan II sebesar 89,92 merupakan komposit indeks pelaksanaan penyebaran informasi dan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial, dll.

Aspek ragam kegiatan dan minat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Bergerak dari hasil survei ini harus menjadi kajian dan masukan bagi Balai POM di Kediri untuk melaksanakan KIE secara sistematis, beragam, dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering dan sesuai dengan latar belakang responden sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hasil survei tingkat efektifitas KIE telah memenuhi target sehingga perlu dilakukan upaya agar capaiannya konsisten pada triwulan selanjutnya. Balai POM di Kediri harus meningkatkan kualitas dan menambah intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan metode daring/ luring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan melibatkan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Balai POM di Kediri tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu Balai POM di Kediri sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh Balai POM di Kediri akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjaring minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 79 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Rp. 11.284.000	Rp. 10.184.156	90,25%	100 %	0,16 (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator tingkat efektivitas KIE obat dan makanan adalah **Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,16.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 80 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan penyebaran informasi / publikasi di media yang belum pernah dilakukan	-	Pembuatan video edukasi tentang obat dan makanan	TW 4	belum ada pembuatan video edukasi tentang obat dan makanan	sudah ada pembuatan video edukasi tentang obat dan makanan

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Hasil survei tingkat efektivitas KIE telah memenuhi target sehingga perlu dilakukan upaya agar dapat semakin baik pada triwulan selanjutnya dengan Melakukan penyebaran informasi / publikasi di media yang belum pernah dilakukan dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan metode daring/luring harus terus dilakukan sehingga pelaksanaan KIE lebih efektif dan lebih luas menjangkau masyarakat.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan presentase capaian pada triwulan II tahun 2025 mendapatkan kriteria sangat baik dan kriteria efisiensi anggaran mendapatkan kriteria efisien, dapat disimpulkan untuk indikator ini telah memenuhi target. Berdasarkan hasil realisasi dan presentase capaian indikator tingkat efektivitas KIE obat dan makanan pada laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik.

IK.15 Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan**a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025***Tabel 81 Perbandingan terget dan realisasi triwulan II tahun 2025 jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Tahapan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25 %	25 %	100 %	Baik

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025*Tabel 82 Perbandingan terget tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Tahapan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100 %	25%	25 %	Perlu Upaya Keras 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024*Tabel 83 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan*

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Tahapan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2024	35 %	50 %	142,86	Tidak dapat disimpulkan
	2025	25 %	25 %	100	Baik

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2024 dikarenakan target pada tahun 2025 dan 2024 berbeda.

PJAS merupakan kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan

Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah dan komunitas sekolah memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan pangan jajanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target progres jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan II tahun 2025 dapat tercapai dengan kategori “BAIK”. Hal ini dikarenakan Balai POM di Kediri menjalin kerja sama dan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Timur, dan Kantor Kementerian Agama) di Kabupaten Trenggalek. Balai POM di Kediri yang akan melakukan intervensi komunitas di daerah tertentu tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah (pemda) untuk kelancaran dan keberhasilan program di daerah tersebut. Selain koordinasi, perencanaan yang tersusun rapi dan komitmen personil dalam pelaksanaan perencanaan merupakan hal yang mendukung keberhasilan capaian.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa upaya atau kegiatan yang dapat direkomendasikan agar kegiatan pengawalan keamanan pangan di sekolah dapat terlaksana lebih baik serta memiliki keberlanjutan hingga tahun-tahun berikutnya dan menyebar ke sekolah lainnya antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Mendorong agar pemerintah daerah dan dinas terkait memasukkan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran pendidikan dan melakukan replikasi kegiatan.
- Mendorong pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk memasukan kegiatan keamanan pangan dalam kegiatan lain yang telah dilaksanakan di sekolah (sinergitas kegiatan keamanan pangan dengan kegiatan lain).
- Mendorong Dinas Kesehatan agar lebih intensif melaksanakan pengawalan keamanan pangan di sekolah.

- Membuat kegiatan sebagai tindak lanjut kegiatan pangan jajanan anak sekolah aman
- Melakukan pengolahan data hasil kegiatan segera setelah kegiatan dilaksanakan dan memperhatikan batas waktu pelaporan.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 84 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Rp. 16.527.000	Rp. 13.882.500	84,00 %	100%	0,19 (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya tercapai, namun capaian indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efisiensi dari pada indikator tingkat efektivitas KIE obat dan makanan adalah kinerja **Efisien** dengan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,19.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 85 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait	Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek melaksanakan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah	-	-	Belum ada koordinasi pelaksanaan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan	Sudah ada koordinasi pelaksanaan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan k

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tahapan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan aman telah berjalan sesuai dengan perencanaan namun diperlukan upaya agar tahapan berikutnya yang

telah di rencanakan dapat berjalan dengan baik yaitu dengan terus meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek melaksanakan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan presentase capaian pada triwulan II tahun 2025 mendapatkan kriteria sangat baik dan kriteria efisiensi anggaran mendapatkan kriteria tidak efisien, namun belum dapat disimpulkan apakah indikator ini telah memenuhi target/belum, karena indikator ini bersifat kumulatif. Berdasarkan hasil realisasi dan presentase capaian indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik.

IK 16. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 86 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Desa Pangan Aman	35 %	35 %	100 %	Baik

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 87 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Desa Pangan Aman	100 %	35 %	35 %	Perlu Upaya Keras 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 88 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	2024	27,5%	27,5%	100%	Baik
	2025	35%	35%	100%	Baik

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting. Kebijakan pemerintah lainnya yang perlu didukung adalah pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid 19. Program Desa Pangan Aman ini dapat mendukung pemulihan ekonomi di desa melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa.

Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan : advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, pengadaan paket informasi, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Target Desa Pangan Aman BPOM di Kediri tahun 2025 adalah 1 desa. Pada tahun 2025 lokus intervensi di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Pada TW II, tahapan Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah audiensi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek terkait Program Keamanan Pangan Terpadu termasuk Desa Pangan Aman, Advokasi Bersama Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait, dan Koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pelatihan kader keamanan pangan Desa Bersama Kepala Desa Depok dan tim. Realisasi tahapan desa pangan aman di TW II 2025 dihitung sebesar 35%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian yang diperoleh 100,0% (baik).

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 4 sekolah yang tersebar di Kabupaten Trenggalek. Program desa pangan aman merupakan indikator kinerja utama yang baru dilaksanakan BPOM di Kediri di tahun 2024 sehingga diperlukan upaya lebih maksimal dalam pencapaiannya.

Beberapa upaya atau kegiatan yang direkomendasikan agar tahapan kegiatan desa pangan aman dapat terlaksana lebih baik antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek.
- Mengusulkan agar lokus kegiatan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.
- Mendorong agar pemerintah daerah memasukan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran desa dan melakukan replikasi kegiatan.
- Mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan desa untuk mengintegrasikan kegiatan keamanan pangan dalam berbagai kegiatan lain yang telah dilaksanakan desa.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Realisasi tahapan desa pangan aman pada triwulan II sebesar 35% dari target di di triwulan II sebesar 35% sehingga capainnya 100,0% dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan beberapa tahapan kegiatan telah terlaksana yaitu :

- Advokasi Kelembagaan Desa melalui intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing-masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.
- Perencanaan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, pada TW II telah dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan perangkat Desa Depok untuk membentuk Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa. Selain itu, telah disusun

perencanaan bersama untuk pelaksanaan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa yang akan dilaksanakan pada TW III.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indikator ini yaitu :

- Adanya Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, yang menyebabkan perubahan tahapan dan pembobotan pelaksanaan program Desa Pangan Aman sehingga memerlukan strategi – strategi khusus untuk bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 89 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah Desa Pangan Aman	-	5.460.000	-	100%	- Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman sampai dengan TW II yaitu Tidak Efisien, Realisasi anggaran tidak dapat diukur dikarenakan tidak ada rencana penarikan dana pada TW II namun terdapat realiasi anggaran. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan, semula kegiatan direncanakan pada TW III namun dipercepat pelaksanaannya di TW II.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Pada TW II, terdapat beberapa kendala yaitu :

Tabel 90 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada jumlah desa pangan aman

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Program Desa Pangan Aman merupakan program / indikator kinerja baru dilaksanakan pada tahun 2024	Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten	Melakukan Koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek	April 2025	Belum dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lokus pelaksanaan	Koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	bagi BPOM di Kediri, Kota / Kabupaten yang di jadikan lokus berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Sehingga diperlukan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah yang di jakan lokus secara intensif.	Trenggalek terkait pelaksanaan program Desa Pangan Aman (Closed)	terkait pelaksanaan program Desa Pangan Aman		kegiatan	telah dilaksanakan
2	Adanya Efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025 diperlukan penyusunan ulang perencanaan tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman	Telah dilakukan penyusunan perencanaan tahapan program desa pangan aman menyesuaikan efisiensi belanja APBN TA 2025	Melakukan penyusunan perencanaan tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman menyesuaikan dengan Efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025	Maret 2025	Belum ada perencanaan tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman menyesuaikan dengan efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025	Perencanaan tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman telah menyesuaikan dengan efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

- Koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek terkait pelaksanaan program Desa Pangan Aman sehingga tahapan program bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan pangan desa.
- Melakukan penyusunan dan perencanaan tahapan pelaksanaan program desa pangan aman dengan seksama dengan memperhitungkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada.
- Monitoring dan evaluasi berkala implementasi tahapan desa pangan aman sesuai perencanaan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025, diperoleh informasi bahwa capaian Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai POM di Kediri telah memenuhi target yang ditetapkan. Laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025 akan digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja triwulan III tahun 2025.

IK 17. Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 91 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 jumlah pasar aman berbasis komunitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	70 %	70 %	100 %	Baik

b. Perbandingan target Tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 92 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 jumlah pasar aman berbasis komunitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	100 %	70 %	70 %	Akan Tercapai 

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 93 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 jumlah pasar aman berbasis komunitas

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	2024	42	42	100	Baik
	2025	70	70	100	Baik

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, Bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, money pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Target pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 adalah 1 pasar, Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di TW II belum dapat dihitung capainnya karena proses pelaksanaannya akan dihitung capainnya di akhir tahun 2025, namun realisasi tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas di TW II 2025 sudah dapat dihitung sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 70% dari target yang direncanakan di TW II sebesar 70% sehingga capaian yang diperoleh 100,0% (baik).

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program pasar aman berbasis komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 4 sekolah yang tersebar di Kabupaten Trenggalek. Program pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan indikator kinerja utama yang baru dilaksanakan oleh BPOM di Kediri di tahun 2024 sehingga diperlukan Upaya yang lebih untuk dapat mencapainya.

Realisasi tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan II sebesar 70% dari target di di triwulan II sebesar 70% sehingga capainnya 100,0%. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Perencanaan Advokasi Kelembagaan Desa dengan bobot 25%
- Bimtek dan Penyuluhan Kader Pasar Pangan Aman dengan bobot 25%
- Sosialisasi Komunitas Pasar Pangan Aman 20%

Tahapan pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas baru dilaksanakan pada TW II 2025, Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Audiensi dan Advokasi Kelembagaan Pasar dengan bobot 25% (Perencanaan dan pelaksanaan)
- Bimtek dan penyuluhan komunitas pasar sesuai perencanaan 25%
- Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar 20%
- Pengawasan keamanan pangan serta monitoring dan evaluasi 20%
- Pengawasan Pasar pangan aman berbasis komunitas 10 %

Beberapa upaya atau kegiatan yang dapat direkomendasikan agar kegiatan pengawasan keamanan pangan di desa dapat terlaksana lebih baik dan memenuhi batas waktu sesuai juknis, serta kegiatan gerakan keamanan pangan dapat terpelihara dengan baik dan menyebar ke desa lainnya antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Mengusulkan agar lokus kegiatan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah
- Mendorong agar pemerintah daerah memasukkan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran dan melakukan replikasi kegiatan
- Mendorong Pemda/pengelola pasar/kader membuat peraturan/kebijakan pemasukan bahan/produk pangan ke dalam pasar.

- Melakukan pengolahan data hasil kegiatan segera setelah kegiatan dilaksanakan dan memperhatikan batas waktu pelaporan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, program/kegiatan yang dilakukan oleh BPOM di Kediri untuk mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:

- Intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll;
- Koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah yang dijadikan lokus.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 94 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada jumlah pasar aman berbasis komunitas

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN TW II 2025	% REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1,435,000	7,379,004	514,22%	100%	- 0,81 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas sampai dengan TW II 2025 Efisien, karena realisasi anggaran TW II sebesar 514,22% lebih besar dan capaian indikator 100%, dengan Tingkat efisiensi sebesar -0,81 (Tidak Efisien), hal ini dikarenakan kegiatan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas Sosialisasi Keamanan Pangan Komunitas Pasar yang direncanakan dilaksanakan di bulan Juli namun dimajukan di bulan Juni 2025 sehingga anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan RPD yang telah direncanakan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Pada TW II, terdapat beberapa kendala yaitu :

Tabel 95 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada jumlah pasar aman berbasis komunitas

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan program / indikator kinerja baru dilaksanakan pada tahun 2024 bagi BPOM di Kediri, Kota / Kabupaten yang di jadikan lokus berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Sehingga diperlukan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah yang di jakan lokus secara intensif.	Telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lokus pelaksanaan kegiatan dan telah dilakukanan Advokasi	Melakukan Koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek terkait pelaksanaan program Pangan Aman Berbasis Komunitas	Closed	Belum dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lokus pelaksanaan kegiatan	Koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan
2	Adanya Efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025 diperlukan penyusunan ulang perencanaan tahapan pelaksanaan program Pangan Aman Berbasis	Telah dilakukan penyusunan perencanaan tahapan program Pangan Aman Berbasis Komunitas menyesuaikan efisiensi belanja APBN	Melakukan penyusunan perencanaan tahapan pelaksanaan program Pangan Aman Berbasis Komunitas menyesuaikan dengan Efisiensi belanja	Closed	Belum ada perencanaan tahapan pelaksanaan program Pangan Aman Berbasis Komunitas menyesuaikan dengan efisiensi belanja pelaksanaan	Perencanaan tahapan pelaksanaan program Pangan Aman Berbasis Komunitas telah menyesuaikan dengan efisiensi belanja pelaksanaan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Komunitas	TA 2025	pelaksanaan APBN TA 2025		APBN TA 2025	APBN TA 2025
3	Pelaksanaan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas harus menselaraskan / menyesuaikan dengan kegiatan pengelola pasar dan paguyuban pasar kamulan Kabupaten Trenggalek	Telah koordinasi dengan pengelola pasar dan paguyuban pasara kamulan terkait pelaksanaan tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas dan diperoleh kesepakatan jadwal pelaksanaan kegiatan.	Melakukan koordinasi dengan pengelola pasar dan paguyuban pasara kamulan terkait pelaksanaan tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas	Juni 2024	Belum ada kepastian jadwal pelaksanaan kegiatan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas di pasar kamulan	Sudah ada jadwal pelaksanaan kegiatan tahapan program pasar panga naman berbasis komunitas dan sudah dilaksanakan kegiatan Bimtek dan penyuluhan kadaer keamanan pangan serta sosialisasi keamanan pangan pasar panga naman berbasis komunitas di bulan Juni 2025

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

- Koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek terkait pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga tahapan program bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan pangan di pasar yang telah dilakukan intervensi.
- Melakukan penyusunan dan perencanaan tahapan pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas dengan seksama dengan memperhitungkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada, sehingga semua rencana tahapan program dapat dilaksanakan sesuai target yang dan tepat waktu.

- Melakukan koordinasi dengan pengelola pasar dan paguyuban pasara kamulan terkait pelaksanaan tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025, diperoleh informasi bahwa capaian Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai POM di Kediri telah memenuhi target yang ditetapkan. Laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025 akan digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja triwulan II tahun 2025.

SASARAN STRATEGIS 5

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN DAN MUTU

IK 18. Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 96 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan	50	73,89	147,78	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 73,89% dengan target pada Triwulan II sebesar 50% sehingga diperoleh capaian 147,78% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”. Hal ini dikarenakan pada akhir Triwulan II tahapan pendampingan UMK untuk pelaku usaha komoditi pangan olahan, obat bahan alam dan kosmetik sangat antusias memproses tahapan registrasinya setelah diberikan bimbingan teknis dan coaching pada para pelaku usaha peserta pendampingan UMK, hal ini membuat capaian tahapan pada triwulan II lebih besar dari target yang sudah ditentukan.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 97 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	73,89	81,20	Akan tercapai 

Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan, ditentukan berdasarkan beberapa tahapan berikut :

1. Sosialisasi/KIE Keamanan Pangan dengan bobot 5%
2. Penetapan UMK Pangan Olahan Target dengan bobot 10%
3. Bimbingan Teknis CCPOB/CPOTB dan/atau Tahapan pemenuhan Aspek CPKB dengan bobot 30%
4. Fasilitas Pendampingan serta pemeriksaan sarana dengan bobot 50%
5. Pelaporan dan Monitoring Evaluasi dengan bobot capaian 5%

Triwulan II (Januari-Juni) Tahun 2025, telah dilakukan Sosialisasi dan penetapan target sarana yang akan dilakukan pendampingan UMK hingga memperoleh sertifikat CPPOB/CPOTB/ Surat Pemenuhan Aspek CPKB. Proses seleksi UMKM melibatkan lintas sektor terkait, seperti Hipmikindo dan Kadin di wilayah kerja Balai POM di Kediri. Pada akhir bulan April telah dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan UMK untuk komoditi pangan olahan, obat bahan alam dan kosmetik. Kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid selama 3 (tiga) hari. Hari pertama dan kedua penyampaian materi dan diskusi secara daring dan hari ketiga desk tugas yang sesuai dengan produk dan proses produksi dari masing-masing pelaku usaha. Pada bulan Mei dan Juni, secara intens para pelaku usaha di berikan coaching konsultasi via chat, zoom meeting dan tata muka sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing pelaku usaha. Sehingga, pada Triwulan II telah diperoleh realisasi 73,89% dari target tahunan sebesar 91%, dengan capaian 81,2% **(Akan Tercapai)**.

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 98 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan	2024	50	56,67	113,34%	Tidak dapat disimpulkan
	2025	91	73,89	81,2%	Cukup

Perbandingan capaian triwulan II Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk indikator kinerja Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara

Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan mengalami kenaikan, dimana capaian triwulan II Tahun 2024 sebesar 65% dan Tahun 2025 sebesar 81,2%.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian realisasi Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- Koordinasi bersama lintas sektor dalam kegiatan Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan sebelum dilakukannya penetapan target UMK yang akan didampingi memberikan informasi data UMKM yang potensial untuk dilakukan pendampingan.
- Pelaku usaha yang aktif untuk mendapat pendampingan agar memperoleh ijin edar BPOM yang cukup tinggi, sehingga memudahkan penetapan sarana yang akan didampingi ke tahapan Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pada Triwulan II (akhir April 2025).
- Antusiasme pelaku usaha setelah mendapatkan materi Bimbingan Teknis Pendampingan UMK dan coaching dari petugas fasilitator masing-masing komoditi meningkat sehingga capaian tahapan pendampingan UMK lebih besar dari target yang ditetapkan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tahapan-tahapan penetapan UMKM yang akan didampingi sebelum dilakukannya bimbingan teknis pendampingan UMKM yaitu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memperoleh informasi data UMKM yang potensial untuk pembinaan sehingga proses pendampingan lebih optimal serta komitmen petugas dari Sertifikasi dan Inspeksi Balai POM di Kediri yang terus berupaya jemput bola dalam proses seleksi UMKM terpilih.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 99 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos	Rp. 1.452.000	Rp. 1.909.500	131,51 %	147,78%	0,12 (Efisien)

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan					

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran untuk indikator kinerja Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan telah tercapai dibandingkan dengan RPD TW II dan realisasi indikator kegiatan juga telah tercapai, sehingga tingkat efisiensi nya sebesar 0,12 adalah **Efisien**.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Pada triwulan II Tahun 2025 belum terdapat kendala dalam pemenuhan realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

Tabel 100 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melaksanakan Bimbingan Teknis Pendampingan UMK secara <i>daring</i> untuk umum dan <i>coaching</i> terhadap pelaku usaha target pendampingan UMK yang sudah ditetapkan	-	Melaksanakan Bimbingan Teknis Pendampingan UMK secara <i>daring</i> untuk umum dan <i>coaching</i> terhadap pelaku usaha target pendampingan UMK yang sudah ditetapkan	TW IV	Belum ada Bimbingan Teknis Pendampingan UMK secara <i>daring</i> untuk umum dan <i>coaching</i> terhadap pelaku usaha target pendampingan UMK yang sudah ditetapkan	-

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya yang bisa dilakukan dalam menyempurnakan kinerja Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan ditengah-tengah dilakukannya efisiensi anggaran yang terjadi, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pendampingan UMK secara *daring* untuk umum dan *coaching* terhadap pelaku usaha target pendampingan UMK yang sudah ditetapkan.
2. Fasilitasi Pendampingan berupa pemeriksaan sarana yang sebelumnya bisa dilakukan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, saat ini hanya bisa dilakukan selama 1 (satu) kali untuk masing-masing UMK dengan tambahan fasilitasi berupa pendampingan secara hybrid melalui zoom meeting.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil dari Indikator Kinerja Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan / Atau IP CPPOB Pangan Olahan pada capaian triwulan I termasuk dalam kategori Baik. Berdasarkan hasil realisasi dan target capaian indikator. Hal ini dapat digunakan untuk melanjutkan tahapan kegiatan selanjutnya sehingga realisasi yang didapat sesuai/melampaui dengan target tahunan yang sudah direncanakan.

SASARAN STRATEGIS 6**TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT****IK.19 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 55% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 85%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 100% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (55\% \times B) + (85\% \times C) + (100\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 101 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	61%	53,75%	88,11	Cukup

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Realisasi sebesar 53,75% dari target 61%, sehingga capaian sebesar 88,11%. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kediri belum sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga mendapatkan kategori akan tercapai.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 102 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82%	53,75%	65,55	Perlu Upaya Keras 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut : Realisasi sebesar 53,75% dari target 82%, sehingga capaian sebesar 65,55% dengan kriteria Perlu Upaya Keras sehingga masih diperlukan upaya keras untuk mencapai target tahunan.

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 103 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	2024	36,75%	36,75%	100	Baik

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2025	61%	53,75%	88,11	Cukup

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada tahun 2024 dari target TW II 2024 yaitu 36,75% didapat realisasi 36,75%, dengan realisasi tersebut % capaian TW II 2024 yang didapat adalah 100% dengan kriteria cukup. Pada TW II tahun 2025 target yang ingin dicapai adalah 61% namun realisasi hanya sebesar 53,75% sehingga % capaian yang didapat sebesar 88,11% dengan kriteria cukup.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Kegiatan Penindakan sangat bergantung kepada stakeholder terkait *Criminal Justice System* yang terdiri dari Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada 2 perkara *carry over*, telah dilakukan koordinasi dengan *Criminal Justice System* di daerah dan sudah dilakukan proses Tahap 2. Pada akhir Triwulan II untuk 2 perkara *carryover* sudah sampai tahap putusan.
- Perubahan target perkara tahun 2025 dari sebelumnya 1 perkara menjadi 2 perkara sebagai dampak relaksasi anggaran pada akhir TW I 2025. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan capaian 88,11% dalam kategori Cukup karena pada tahun berjalan sudah didapat 1 (satu) perkara sampai pada tahap SPDP.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Penguatan koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan sehingga terjadi satu pemahaman yang sama antara PPNS Badan POM, Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kendala terkait tahapan-tahapan dalam penyidikan.
- Mempertajam kegiatan intelijen dan patroli siber untuk memperoleh target perkara berikutnya di tahun berjalan

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 104 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Rp 90,683,500	Rp 73,072,700	80,58	88,11%	0,09 (Efisien)

Pada Triwulan II tahun 2025 ini dari target anggaran Rp 90,683,500,- sudah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp 73,072,700,- atau dalam persen realisasi anggaran berada di angka 80,58%. Pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah 88,11% dengan tingkat efisiensi 0,09. Kriteria yang didapat adalah Efisien. Pada triwulan III akan dilakukan perencanaan penggunaan sumber daya semaksimal mungkin untuk mempertahankan kriteria efisien.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 105 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Mengawal pencapaian target sampai dengan TW IV tahun 2025	-	Monitoring dan pengawalan pencapaian target sampai dengan TW IV tahun 2025	TW IV Tahun 2025	81,97%	88,11%

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

- Merencanakan kembali kegiatan penindakan dengan baik terutama kegiatan intelijen

untuk mendapatkan perkara pada tahun berjalan.

i. **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Kesimpulan hasil indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah **Cukup** sehingga untuk indikator ini perlu dilakukan usaha supaya mendapatkan nilai sesuai yang ditargetkan. Berdasarkan hasil realisasi dan persentase capaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tergambar pada Laporan Kinerja Interim TW II Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian pada triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik.

SASARAN STRATEGIS 7**TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT****IK.20 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis.
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 106 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50%	45.84%	91,67	Baik

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Realisasi sebesar 45,84% dari target 50%, sehingga capaian sebesar 91,67%. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Kediri sudah sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga mendapatkan kategori Cukup.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 107 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	45,84%	50,93	Perlu Upaya Keras 

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut : Realisasi sebesar 45,84% dari target 90%, sehingga capaian sebesar 50,93% dengan kriteria Perlu Upaya Keras sehingga masih diperlukan upaya keras untuk mencapai target tahunan.

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 108 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	2024	-	-	-	-
	2025	50%	45.84%	91,67	Baik

Perbandingan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar antara TW II tahun 2024 dengan TW II tahun 2025 tidak bisa dibandingkan karena pada tahun sebelumnya belum dilakukan penilaian karena IK ini baru ada di tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Persentase laporan analisis masih belum sesuai dengan target yang ingin dicapai karena ada laporan *profiling siber* yang tidak dilaporkan tepat waktu.
- Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun) akan dinilai pada triwulan IV sehingga belum dapat

dimasukkan ke dalam akumulasi capaian.

- Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun) akan dinilai pada triwulan IV sehingga belum dapat dimasukkan ke dalam akumulasi capaian.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Membuat laporan patroli siber dan profiling siber tepat waktu di aplikasi inawcrawler dan dashboard penindakan.
- Mengumpulkan data untuk membuat Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 109 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Rp 5,920,000	Rp. 2,921,160	49,34	91,67	0,86 (Efisien)

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja masih dinilai tidak efisien sehingga diperlukan perencanaan untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam mencapai kinerja.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 110 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Komitmen petugas dalam	-	Melaporkan hasil analisis	TW IV 2025	83,33%	91,67%

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
	melaporkan hasil analisis penelusuran siber tepat waktu sudah baik, namun keterlambatan pelaporan pada bulan Februari 2025 berdampak pada realisasi di sepanjang tahun berjalan.		penelusuran siber tepat waktu sudah baik, namun keterlambatan pelaporan pada bulan Februari 2025 berdampak pada realisasi di sepanjang tahun berjalan.			

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

- Membuat laporan patroli siber dan profiling siber tepat waktu di aplikasi inawcrawler dan dashboard penindakan.
- Mengumpulkan data untuk membuat Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Kesimpulan hasil indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah **Baik** namun indikator ini masih dilakukan usaha supaya mendapatkan nilai sesuai yang ditargetkan. Berdasarkan hasil realisasi dan persentase capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar yang tergambar pada Laporan Kinerja

Interim TW II Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian pada triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik.

SASARAN STRATEGIS 8**LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA****IK 21. Indeks Pelayanan Publik UPT**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek yang dituangkan sebagai Indeks F02, meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Penilaian UPP melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik diperoleh dengan perhitungan 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Indeks F03 diperoleh berdasarkan hasil survei dari pengguna layanan publik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 111 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 indeks pelayanan publik UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISAS I s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-

Pada TW II belum dimulai periode penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada TW II belum terdapat nilai untuk IPP dari Balai POM di Kediri.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 112 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 indeks pelayanan publik UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISAS I s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20	-	-	-

Pada TW II belum dimulai periode penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Penilaian IPP dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi dan

dilaksanakan sekali dalam satu tahun, sehingga tidak ada capaian target per triwulan. Pada TW II belum terdapat nilai untuk IPP dari Balai POM di Kediri.

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 113 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 indeks pelayanan publik UPT

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	2024	3,55	-	-	NA
	2025	4,20	-	-	NA

Tidak dapat dibandingkan dikarenakan Pada TW II belum terdapat nilai untuk IPP dari Balai POM di Kediri.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024 telah dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, dengan hasil yang diperoleh BPOM di Kediri sebesar 3,88 (kategori baik) dengan rincian aspek sesuai tabel berikut :

Tabel 114 Rekomendasi perbaikan kinerja indeks pelayanan publik UPT

No.	Aspek	Pemenuhan indeks	Rekomendasi
1.	Kebijakan pelayanan	4,24	- Layanan yang tersedia pada MPP juga agar dapat diinformasikan pada revisi SP berikutnya - Target peserta pada FKP agar tepat sasaran - Meningkatkan sosialisasi Standar Pelayanan melalui media elektronik dan media sosial
2.	Profesionalisme SDM	2,9	- Penyesuaian kebijakan standar pelayanan pada waktu pelayanan - Kebijakan peningkatan motivasi petugas pelayanan dan reward and punishment
3.	Sarana dan Prasarana	4,29	- Peningkatan dan pemenuhan fasilitas UPP secara bertahap

No.	Aspek	Pemenuhan indeks	Rekomendasi
4.	Sistem informasi pelayanan publik	4,4	- Pemutakhiran data pada SIPPN
5.	Konsultasi dan pengaduan	4,6	- Meningkatkan kualitas sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka.
6.	Inovasi	0,5	- menciptakan inovasi dalam pelayanan publik

Telah dilakukan reviu Standar Pelayanan BPOM di Kediri Tahun 2024, dilakukan pembaharuan sesuai hasil evaluasi PEKPPP dan berdasarkan hasil FKP. Standar pelayanan ini mencakup seluruh jenis layanan yang diberikan. Review Standar Pelayanan Publik dilakukan setiap tahun untuk menyesuaikan peraturan dan kebijakan terbaru serta mengakomodir masukan dari konsumen terkait pelayanan publik di BPOM di Kediri. Pelaksanaan FKP tahun 2024 telah melibatkan berbagai unsur masyarakat yaitu penyelenggara layanan, Stakeholder pelayanan publik, Organisasi Masyarakat/ LSM, Pengguna Layanan, Ahli/ Pakar, dan Media Massa.

Selain itu, BPOM di Kediri telah melakukan renovasi ruang pelayanan publik dengan penambahan fasilitas, sarana dan prasarana bagi kelompok rentan. BPOM di Kediri juga telah menciptakan Inovasi Layanan Interaktif BPOM Kediri Terpadu via Zoom (LINTAZ) sehingga memudahkan masyarakat mengakses dalam jarak jauh. Namun, pemutakhiran data pada SIPPN belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan website yang seringkali tidak dapat diakses karena masih dalam perbaikan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan untuk pemenuhan terhadap 6 aspek pada penilaian Indeks Pelayanan Publik yaitu :

- Review Standar Pelayanan BPOM di Kediri Tahun 2025 yang mencakup seluruh jenis layanan yang diberikan.
- Monitoring evaluasi, tinjau ulang Standar Pelayanan Publik, dan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik telah dilakukan setiap tahun untuk menyesuaikan peraturan dan kebijakan yang terbaru serta mengakomodir masukan dari konsumen terkait standar pelayanan.
- Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di berbagai media elektronik/non elektronik.

- Melaksanakan SKM sesuai dengan ketentuan dan menindaklanjuti hasil SKM
- Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik secara bertahap termasuk renovasi ruangan pelayanan publik
- Mengembangkan inovasi pelayanan publik yaitu LINTAZ (Layanan Interaktif BPOM Kediri Terpadu via Zoom) yang mudah diakses masyarakat di mana saja sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor BPOM di Kediri atau ke Mal Pelayanan Publik.
- Menyusun kebijakan terkait *reward dan punishment* untuk penyelenggaraan pelayanan publik di BPOM di Kediri sebagai upaya meningkatkan motivasi pelayanan. Selain itu, pelatihan petugas pelayanan untuk meningkatkan profesionalisme SDM juga dilakukan oleh BPOM di Kediri.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 115 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada indeks pelayanan publik UPT

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Pelayanan Publik	Rp. 9.310.000	Rp. 9.730.000	104,51%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pada TW II ini sudah terdapat capaian anggaran untuk mendukung IPP sebesar 104,51%, namun capaian indikator belum terdapat nilai karena merupakan indeks tahunan. Sehingga tingkat efisiensi dari kinerja pada indikator Indeks Pelayanan Publik pada TW II belum dapat dihitung.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 116 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada indeks pelayanan publik UPT

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Reviu standar pelayanan	Closed	-	-	Standar pelayanan belum disesuaikan/diperbarui	Standar pelayanan disesuaikan dengan hasil evaluasi PEKPP, SKM, dan FKP
2.	Penyesuaian target peserta FKP	Closed	-	-	Target peserta FKP belum tepat sasaran	Target peserta FKP tepat sasaran
3.	Publikasi standar layanan lebih ditingkatkan	Closed	-	-	Publikasi SP belum maksimal	Publikasi SP dimaksimalkan melalui berbagai media

4.	Menyusun kebijakan pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan	Closed	-	-	Belum terdapat kebijakan pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan	Telah memiliki kebijakan pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan yang dapat meningkatkan motivasi petugas layanan
5.	Membuat inovasi pelayanan publik	Closed	-	-	Belum memiliki inovasi pelayanan publik	Telah memiliki inovasi dalam pelayanan publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat

h. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Menyusun Lembar Kerja Evaluasi penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik PEKPPP secara tepat waktu
2. Memenuhi data dukung sesuai aspek penilaian
3. Publikasi Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan mandiri secara rutin
4. Melakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan profesionalisme SDM dan penerapan kebijakan reward dan punishment

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar dalam evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pelayanan publik di BPOM di Kediri. Pada Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP), namun informasi dalam laporan telah digunakan untuk menyusun Standar Pelayanan Publik tahun 2025, merancang strategi peningkatan kualitas layanan, serta menindaklanjuti rekomendasi evaluasi sebelumnya. Selain itu, laporan ini menjadi bermanfaat dalam pengembangan inovasi pelayanan seperti Layanan Interaktif BPOM Kediri Terpadu via Zoom (LINTAZ) yang dimulai pada TW I 2025.

SASARAN STRATEGIS 9**TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL****IK 22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM**

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu Langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan public kepada Masyarakat secara cepat, tepat dan professional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan Zona Integritas dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assesment dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Pusat.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen yaitu:

Tabel 117 Komponen pengungkit nilai pembangunan ZI

No.	Komponen Pengungkit	Bobot
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel 118 Komponen hasil nilai pembangunan ZI

No.	Komponen Hasil	Bobot
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5%
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 119 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 nilai pembangunan ZI UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	N/A

Hasil penilaian LKE ZI disampaikan oleh Tim Penilai Internal pada akhir tahun/triwulan IV setelah dilakukan penyusunan LKE ZI. Nilai Pembangunan Zona Intergitas tidak menjadi target triwulan, pada triwulan II belum terdapat penilaian dari indikator kinerja ini.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 120 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 nilai pembangunan ZI UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	N/A

Hasil penilaian LKE ZI disampaikan oleh Tim Penilai Internal pada akhir tahun/triwulan IV setelah dilakukan penyusunan LKE ZI. Nilai Pembangunan Zona Intergitas tidak menjadi target triwulan, pada triwulan II belum terdapat penilaian dari indikator kinerja ini.

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 121 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 nilai pembangunan ZI UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	2024	75	-	-	N/A
	2025	75	-	-	N/A

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenasi perbaikan kinerja)

Balai POM di Kediri telah menerapkan secara bertahap Zona Integritas. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam Pembangunan Zona Integritas Balai POM di Kediri adalah:

- Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan seluruh pegawai;
- Menciptakan inovasi yang memiliki daya ungkit terhadap kinerja dan pelayanan publik;
- Melakukan internalisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan *awareness* pegawai terhadap pentingnya Reformasi Birokrasi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Mereviu SK Kepala Balai terkait anggota tim Zona Integritas untuk melibatkan seluruh pegawai termasuk pegawai baru dan lebih meningkatkan kinerja dan peran aktif seluruh pegawai dalam mengimplementasikan RB di Balai POM di Kediri.
- Program Kerja Tim AoC diharapkan dapat mendorong internalisasi dan implementasi Zona Integritas di Balai POM di Kediri.
- Melakukan penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai Balai POM di Kediri.
- Peningkatan Pemahaman ASN Balai POM di Kediri mengenai Core Value ASN BerAKHLAK melalui kegiatan yang lebih kreatif.
- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tepat waktu.
- Penyampaian Laporan SPT Tahunan tepat waktu.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 122 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada nilai pembangunan ZI UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Rp. 303.296.643	Rp. 267.084.207	88,06%	-	-

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 123 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada nilai pembangunan ZI UPT BPOM

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Menyusun rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target	-	Menyusun rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target	TW IV	Belum tersusunnya rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target	Rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target prioritas pada setiap area

	prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM		prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM		prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM telah tersusun
--	--	--	--	--	--	--

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Balai POM di Kediri secara bertahap terus berupaya menerapkan Zona Integritas yaitu dengan:

1. Mengimplementasikan Inovasi pada Balai POM di Surakarta dan mendokumentasikannya.
2. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Kesimpulan hasil dari Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas UPT BPOM tidak menjadi target triwulan sehingga pada triwulan II belum terdapat penilaian dari indikator kinerja ini.

IK 23. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 124 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 nilai AKIP UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

b. Perbandingan Target Tahunan 2025 dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tabel 125 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 nilai AKIP UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP UPT	78,55	-	-	-

c. Perbandingan Capaian Triwulan II tahun 2025 dengan Capaian Triwulan II Tahun 2024

Tabel 126 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 nilai AKIP UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP UPT	2024	77,75	-	-	-
	2025	78,55	-	-	-

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM pada triwulan keempat. Target nilai AKIP UPT merupakan target tahunan dengan realisasi penilaian didapatkan pada triwulan keempat sehingga untuk triwulan II hasil penilaian tidak dapat disimpulkan.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan penilaian AKIP tahun 2024, dapat disimpulkan yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan penilaian AKIP serta upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Balai POM di Kediri antara lain :

1. Melakukan penyusunan rencana kinerja dengan baik dan selaras antara Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
2. Pada pelaporan kinerja mengakomodir informasi perubahan yang terjadi, seperti perubahan definisi operasional, perubahan target, perubahan indikator kinerja dan sebagainya
3. Pelaporan kinerja menjelaskan upaya efisiensi penggunaan sumber daya
4. Evaluasi Internal menjelaskan terkait seluruh indikator sasaran kinerja
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terkait capaian kinerja Evaluasi Internal memuat adanya kendala dan rekomendasi perbaikan dari masing masing indikator kinerja.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan kinerja pada tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian nilai AKIP UPT yaitu :

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Pemanfaatan aplikasi simetris dalam kegiatan perencanaan kinerja
4. Pemanfaatan aplikasi e-performance dalam pelaporan realisasi kinerja bulanan
5. Kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan yang dilaksanakan secara rutin oleh Balai POM di Kediri

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 127 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja nilai AKIP UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai AKIP UPT	Rp. 15.717.575	Rp. 9.745.325	62 %	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target anggaran tahun 2025 untuk indikator Nilai AKIP UPT belum terdapat realisasi pada triwulan II tahun 2025, capaian akan dihitung pada akhir tahun sehingga untuk capaian indikator dan analisis efisiensi tidak dapat disimpulkan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 128 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya nilai AKIP UPT BPOM

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	SOP Mikro Pengukuran/ Pengumpulan Data Kinerja belum mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan / kesalahan data	Menyempurnakan SOP tentang pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta penyusunan laporan dengan mekanisme perubahan/kesalahan data kinerja	-	2025	SOP Mikro Pengukuran/ Pengumpulan Data Kinerja belum mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan/kesalahan data	SOP Mikro Pengukuran/ Pengumpulan Data Kinerja telah mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan/kesalahan data

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan rencana kinerja dengan baik dan selaras antara Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja;

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terkait capaian kinerja dan anggaran;
3. Menyusun pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan dan melaporkan sesuai timeline
4. Melakukan sharing session internal tentang konsep AKIP dan penyusunan laporan Kinerja

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada indikator Nilai AKIP UPT tahun 2024 target yang ditetapkan telah tercapai / melampaui namun belum bisa mencapai target renstra tahun 2024, maka laporan kinerja dimanfaatkan untuk penyusunan target renstra tahun 2025 – 2029. Berdasarkan hasil realisasi dan presentase capaian indikator Nilai AKIP UPT hingga akhir tahun 2024 yang tergambar pada Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian tahun berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik.

IK.24 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sedangkan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Delapan (8) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), adalah: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Capaian Output serta Dispensasi SPM. Sedangkan indikator pembentuk Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari Variabel efektivitas berupa Capaian RO (bobot 75%) dan Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%). Nilai IKPA dan EKA bersumber dari aplikasi SMART DJA dan aplikasi OM SPAN.

Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran diukur pada akhir tahun, namun untuk capaian IKPA dapat dipantau nilainya setiap bulan melalui aplikasi OM SPAN. Sampai dengan Triwulan II 2025 nilai IKPA Balai POM di Kediri adalah 100 dan nilai ini akan diupayakan dapat dipertahankan hingga Triwulan IV tahun 2025.

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025*Tabel 129 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 nilai kinerja anggaran UPT BPOM*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	N/A

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025*Tabel 130 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 nilai kinerja anggaran UPT BPOM*

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	N/A

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024*Tabel 131 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 nilai kinerja anggaran UPT BPOM*

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2024	-	-	-	N/A
	2025	5	-	-	N/A

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II 2025 belum dapat disajikan karena pengukuran dilakukan di akhir tahun, namun Balai POM di Kediri berupaya mengawal capaian IKU ini agar dapat mencapai nilai optimal. Beberapa langkah yang dilakukan Balai POM Kediri sebagai berikut:

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran dan capaian output kinerja
- Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan sehingga berdampak positif terhadap penilaian realisasi anggaran dan RPD.
- Menyampaikan pelaporan capaian output melalui aplikasi secara tepat waktu
- Menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan secara akurat dan dilaporkan tepat waktu

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Penggalangan komitmen seluruh pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala
- Keterlibatan pimpinan dalam mengawal capaian kinerja dan anggaran dalam mendukung tujuan organisasi

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam mencapai Kinerja

Tabel 132 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja nilai kinerja anggaran UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Rp. 1. 620.542.245	Rp. 1.573.286.922	97,08%	-	N/A

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran sudah mencapai 55,31% namun capaian kinerja belum dapat diketahui karena dihitung pada akhir tahun. Sampai Triwulan II tahun 2025 komponen yang dapat dipantau capaiannya adalah IKPA yaitu nilainya 100, Balai POM di Kediri akan terus berupaya mengawal capaian indikator kinerja NKA UPT BPOM sehingga di akhir tahun akan diperoleh nilai maksimal.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 133 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada nilai kinerja anggaran UPT BPOM

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan monitoring dan evaluasi baik kinerja maupun anggaran secara periodik, melakukan percepatan pelaksanaan	-	Monitoring dan evaluasi baik kinerja maupun anggaran secara periodik, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan	TW IV 2025	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	kegiatan dan optimalisasi anggaran.		optimalisasi anggaran.			

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Upaya untuk memperbaiki Nilai Kinerja Anggaran adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi baik kinerja maupun anggaran secara periodik, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi anggaran.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan ini digunakan untuk pemantauan progress terhadap target yang telah ditetapkan dan sebagai monitoring perbaikan terhadap capaian periode sebelumnya.

IK.25 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 134 Kategori nilai maturitas manajemen risiko

Menuju Maturitas	Tingkat	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive		0-16	1	-
Risk Aware		17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined		33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed		49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled		65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 135 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2025 indeks manajemen risiko UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-

Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri akan diketahui nilainya pada triwulan IV sehingga masih belum bisa dilakukan perbandingan.

b. Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025

Tabel 136 Perbandingan target tahunan 2025 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2025 indeks manajemen risiko UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	-	-	-

Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri akan diketahui nilainya pada triwulan IV sehingga masih belum bisa dilakukan perbandingan.

c. Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024

Tabel 137 Perbandingan capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024 indeks manajemen risiko UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2024	-	-	-	-
	2025	3	-	-	-

Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri akan diketahui nilainya pada triwulan IV sehingga masih belum bisa dilakukan perbandingan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, nilai maturitas manajemen risiko meningkat 0,03 dari tahun 2023, sebelumnya 2,75 menjadi 2,781. Namun masih terdapat beberapa kelemahan pada tahun sebelumnya yaitu :

- Belum seluruh pegawai telah diberikan pelatihan terkait manajemen risiko.
- Belum memiliki perencanaan pengembangan kompetensi yang berkesinambungan terkait manajemen risiko untuk seluruh pegawai.
- Belum mengidentifikasi risiko pada seluruh sasaran strategis;
- Tanggung jawab terkait pengelolaan risiko belum dituangkan baik dalam Matriks Peran Hasil (MPH) maupun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai yang menangani manajemen risiko.
- Belum dilakukan pengujian aktivitas pengendalian pada risiko inheren dengan kriteria level risiko tinggi dan level risiko sangat tinggi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Pada tahun 2025 seluruh pegawai diwajibkan untuk mengikuti pelatihan manajemen risiko di IDEAS.
- Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi yang berkesinambungan terkait manajemen risiko untuk seluruh pegawai.
- Mengidentifikasi risiko pada seluruh sasaran strategis.
- Memasukkan tanggung jawab pengelolaan risiko dalam MPH dan uraian tugas SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam mengelola manajemen risiko.
- Menyusun dan menetapkan pengujian aktivitas pengendalian terhadap seluruh risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan selera risiko yang telah ditetapkan BPOM.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 138 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada indeks manajemen risiko UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	RPD TW II	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	INDIKATOR KINERJA
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Rp. 6.178.300	Rp. 3.156.940	51,10%	-	-	-

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kediri pada triwulan II ini dari target anggaran sebesar Rp.6,178,300,- sudah terealisasi sejumlah Rp. 3,156,940,- sehingga % realisasi anggaran sebesar 51,10%. Masih diperlukan upaya untuk dapat memperoleh target yang ingin dicapai oleh Balai POM di Kediri.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 139 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya pada indeks manajemen risiko UPT BPOM

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi		
		Selesai*	Belum**					
			Rencana Aksi	Timeline				
1	Melakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulanan terhadap progres pengujian aktivitas pengendalian terhadap seluruh risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi.	-	Melakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulanan terhadap progres pengujian aktivitas pengendalian terhadap seluruh risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi	TW IV	Belum monitoring dan evaluasi setiap Triwulanan terhadap progres pengujian aktivitas pengendalian terhadap seluruh risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi	-		

h. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Sebagai upaya peningkatan capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan beberapa upaya rencana aksi sebagai berikut :

- Melakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulan terhadap progres pengujian aktivitas pengendalian terhadap seluruh risiko dengan level risiko inheren tinggi dan sangat tinggi.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Interim TW II Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pencapaian pada triwulan berikutnya agar menghasilkan output yang lebih baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Balai POM di Kediri yang digunakan pada laporan kinerja triwulan II tahun 2025 mengacu pada DIPA Rev 2 (POK 4) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.236.903.000,-, termasuk blokir anggaran sebesar Rp. 15.247.811.000 sehingga pagu anggaran yang bisa digunakan adalah sebesar RP. 9.002.592.000.

Realisasi anggaran sampai dengan periode triwulan II adalah sebesar Rp. 3.469.292.671,- dengan presentase capaian realisasi terhadap pagu anggaran adalah sebesar 38,53%.

Balai POM Kediri berupaya dalam memaksimalkan pencapaian target kinerja dan mengoptimalkan serapan anggaran antara lain yaitu :

1. Menjaga komitmen dari level pimpinan hingga staf BPOM di Kediri dalam rangka pencapaian target output dan pelaksanaan realisasi anggaran
2. Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan oleh masing masing fungsi yang ada di Balai POM di Kediri
3. Memiliki komitmen dalam menjaga ketepatan RPD yang telah disusun
4. Melaksanakan monitoring terhadap RPD setiap bulan
5. Memperkuat pengendalian internal melalui pembentukan tim penyusun program/kegiatan (PIPK) dan Tim Monev sehingga tersedia informasi data yang handal

Realisasi Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

Berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja pada periode TW II tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Volume			Anggaran		
					Target	Realisasi	% Capaian	RPD TW II	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81,75	81,75	99,75	122,02	25.944.700	19.790.951	76,28
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	0	8,89	0	5.611.000	13.860.000	247,61
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	75,00	90,00	120,00	8.843.640	6.460.770	73,06
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100,00	0	0	1.473.940	1.076.795	73,06
		5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	75,00	100,00	133,33	4.421.820	3.230.385	73,06
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	98	92,00	89,13	96,88	6.750.000	24.936.000	369,42

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Volume			Anggaran		
					Target	Realisasi	% Capaian	RPD TW II	Realisasi	% Capaian
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	93,00	100,00	107,53	9.474.000	10.457.944	110,39
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80,00	98,48	123,11	9.474.000	10.457.944	110,39
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,25	92,25	94,23	102,15	10.431.125	15.075.000	144,52
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	98,54	123,18	3.140.000	8.335.000	265,45
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	87,97	87,97	98,31	111,75	11.357.000	1.177.700	10,37
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67	61,00	60,00	98,36	13.983.000	7.244.000	51,81

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Volume			Anggaran		
					Target	Realisasi	% Capaian	RPD TW II	Realisasi	% Capaian
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	11,00	11,87	107,90	1. 317.403.080	1.369.377.769	103,95
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84,37	84,37	88,00	104,30	11.284.000	10.184.156	90,25
		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	4	25,00	25,00	100,00	16.527.000	13.882.500	84,00
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	1	35,00	35,00	100,00	-	5.460.000	-
		17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	70,00	70,00	100,00	1.435.000	7.379.004	514,22
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	91	50,00	73,89	147,78	1.452.000	1.909.500	131,51

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Volume			Anggaran		
					Target	Realisasi	% Capaian	RPD TW II	Realisasi	% Capaian
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	82	61,00	53,75	88,11	90.683.500	73.072.700	80,58
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50,00	45,84	91,67	5.920.000	2.921.160	49,34
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,20	-	-	Diukur akhir tahun	9.310.000	9.730.000	104,51
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,00	-	-	Diukur akhir tahun	303.296.643	267.084.207	88,06
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	78,55	-	-	Diukur akhir tahun	15.717.575	9.745.325	62,00
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	-	-	Diukur akhir tahun	1.620.542.245	1.573.286.922	97,08
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	-	-	Diukur akhir tahun	6.178.300	3.156.940	51,10

Realisasi Anggaran per Sasaran

Berikut merupakan tabel Realisasi Anggaran untuk setiap Sasaran Kegiatan pada periode TW II tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	339.467.000	114.858.489	51,25%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16.071.000	7.244.000	45,07%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	4.847.415.000	1.369.377.769	28,25%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	172.551.000	36.905.660	21,39%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	4.462.000	1.909.500	42,79%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	221.754.000	73.072.700	32,95%
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17.989.000	2.921.160	16,24%
8	Layanan Publik UPT yang prima	20.405.000	9.730.000	47,68%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	3.365.138.000	1.853.273.393	55,07%

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sakip

Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Terhadap Penilaian AKIP Balai POM di Kediri Tahun 2024

Tabel 140 Tindak lanjut rekomendasi Inspektorat terhadap penilaian AKIP BPOM di Kediri Tahun 2024

N o	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Memastikan adanya dokumen pendukung atas perubahan RAPK Balai POM di Kediri	1. Usulan perubahan RAPK telah diajukan ke Biro Perencanaan dan Keuangan. 2. SOP Mikro Pengukuran / Pengumpulan Data Kinerja terkait adanya perubahan data telah di lakukan review.	1. Memastikan balasan usulan perubahan RAPK telah diajukan ke Biro Perencanaan dan Keuangan. 2. Melakukan reviu SOP Mikro Pengukuran/Pengu mpulan Data Kinerja terkait adanya perubahan data.	Minggu ke 2 bulan April 2025	a. Terdapat revisi dokumen RAPK tanggal 20 Mei 2024 dan data pada aplikasi SIMETRIS telah dilakukan penyesuaian namun dokumen pendukung tidak ditemukan, yaitu: 1) Dokumen usulan perubahan RAPK ke Biro Perencanaan dan Keuangan; 2) Dokumen persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap perubahan RAPK	1.Usulan perubahan RAPK telah diajukan ke Biro Perencanaan dan Keuangan. 2.SOP Mikro Pengukuran/Pengu mpulan Data Kinerja terkait adanya perubahan data telah di lakukan review.
2	Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan pada e-SAKIP REVIU dan subsite Satuan Kerja	Dokumen perencanaan telah dipublikasikan pada subsite Balai POM di Kediri dan pada aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id) yaitu dokumen berupa PK Revisi, RAPK Revisi dan Laporan Evaluasi Paruh Waktu Renstra	1. Menyusun daftar seluruh dokumen perencanaan yang harus dipublikasikan. 2. Memastikan seluruh dokumen perencanaan tahun 2025 dipublikasikan pada subsite Balai POM di Kediri dan pada aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id	TW I	Belum seluruh dokumen perencanaan dipublikasikan pada subsite Balai POM di Kediri dan pada aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go. id) yaitu dokumen berupa PK Revisi, RAPK Revisi dan Laporan Evaluasi Paruh Waktu Renstra	Seluruh dokumen perencanaan telah dipublikasikan pada subsite Balai POM di Kediri dan pada aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id) yaitu dokumen berupa PK Revisi, RAPK Revisi dan Laporan Evaluasi Paruh Waktu Renstra
3	Memastikan keselarasan penyajian target	Target indikator kinerja tahun 2025 pada dokumen SAKIP (PK, RAPK, EVIN	1. Memastikan keselarasan target dengan program dan kegiatan yang telah disusun dalam	TW I s/d TW IV	Terdapat Perbedaan target indikator kinerja tahun 2024 pada	Target indikator kinerja tahun 2025 pada dokumen SAKIP (PK, RAPK,

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	indikator kinerja pada dokumen SAKIP	dan Lapkin Interim) selaras.	rencana kerja yang tertuang dalam form penyelarasan data dan melakukan penyesuaian target yang berbeda. 2. Dibuatkan form perubahan data yang diisi oleh masing-masing Ketua Tim yang disetujui dan disahkan oleh penanggungjawab data dan Kepala UPT		dokumen SAKIP (PK, RAPK, EVIN dan Lapkin Interim)	EVIN dan Lapkin Interim) selaras.
4	Menyusun matriks reviu target indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.	Matriks reviu target indikator tahun 2024 & 2025 mencantumkan justifikasi untuk target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.	1. Menyusun justifikasi atau alasan yang jelas mengapa target ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. 2. Mengidentifikasi seluruh target indikator kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. 3. Membuat matriks reviu yang mencantumkan target beserta justifikasi terkait penurunan target tersebut. 4. Dibuatkan lembar konfirmasi terkait justifikasi target tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan melampirkan : 1. Target dan capaian 2023, 2. Target dan capaian 2024 serta justifikasinya	Minggu ke 2 bulan April 2025	Matriks reviu target indikator tahun 2024 belum mencantumkan justifikasi untuk target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.	Matriks reviu target indikator tahun 2024 & 2025 telah mencantumkan justifikasi untuk target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.
5	Menyempurnakan SOP tentang pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta penyusunan laporan dengan mekanisme		1. Melakukan review serta menyempurnakan SOP bersama tim terkait (perencana, pengukuran kinerja, dan pimpinan) lampirkan form	Minggu ke 2 bulan April 2025	SOP Mikro Pengukuran / Pengumpulan Data Kinerja belum mencantumkan mekanisme jika terjadi	SOP Mikro Pengukuran / Pengumpulan Data Kinerja sudah mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan / kesalahan data.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	perubahan/kesalahan data kinerja;		usulan perubahan 2. Sosialisasi SOP yang disempurnakan kepada seluruh Katim tim monev dalam pengumpulan, pengukuran, dan pelaporan data kinerja.		perubahan / kesalahan data, antara lain: Tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan; Tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan.	antara lain: Tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan; Tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan.
6	Menyusun notulen rapat evaluasi internal yang menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja secara spesifik (tidak hanya bersifat umum)	Laporan Evaluasi Internal telah menyajikan arahan pimpinan atas kendala pengukuran dan/atau hasil capaian kinerja secara spesifik (hanya bersifat umum)	1. Memastikan setiap rapat evaluasi internal mendokumentasikan arahan pimpinan secara spesifik untuk setiap topik yang dibahas. 2. Pembahasan permasalahan dituangkan dalam form rekomendasi tindak lanjut dengan bahasan pada rapat sebelumnya	Setiap bulan pada rapat bulanan	Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan arahan pimpinan atas kendala pengukuran dan/atau hasil capaian kinerja secara spesifik (hanya bersifat umum)	Laporan Evaluasi Internal telah menyajikan arahan pimpinan atas kendala pengukuran dan/atau hasil capaian kinerja secara spesifik (hanya bersifat umum)
7	Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/ kertas kerja dapat ditelusur/ sesuai dengan dokumen monev (sumber data)	perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/ kertas kerja dapat ditelusur/ sesuai dengan dokumen monev (sumber data)	1. Membandingkan data capaian kinerja pada RHPK dengan sumber data yang tercantum dalam dokumen monev, memastikan kesesuaian antara keduanya. 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi jika terdapat perbedaan data antara RHPK/kertas kerja dengan dokumen monev, termasuk mencari penyebab perbedaan 3. Dibuatkan lembar konfirmasi terkait justifikasi perubahan data yang dilaporkan 4. Dibuatkan kertas kerja penjelasan dan sumber data pembilang dan penyebut terperinci	Setiap bulan	Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) / kertas kerja capaian indikator tidak dapat ditelusur/ berbeda dengan dokumen monev (sumber data), sebagai contoh indikator Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan pada triwulan II tahun 2024.	Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) / kertas kerja capaian indikator dapat ditelusur/ sama dengan dokumen monev (sumber data).
8	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam	Form penyalarsan data yang diisi oleh masing-	1. Dibuatkan form penyalarsan data yang diisi oleh masing-masing	Setiap bulan	Terdapat Perbedaan penyajian realisasi	Tidak Terdapat Perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada SKP, aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	masing Ketua Tim yang disetujui dan disahkan oleh penanggung jawab data dan Kepala UPT dan lembar konfirmasi perubahan data dan justifikasinya telah dibuat	Ketua Tim yang disetujui dan disahkan oleh penanggung jawab data dan Kepala UPT 2. Dibuatkan lembar konfirmasi perubahan data dan justifikasinya		indikator kinerja antara Simetris, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	antara Simetris, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja lagi.
9	Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi;	Mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi	1. Menyusun kebijakan yang mengatur mekanisme pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan organisasi yang objektif dan terukur 2. Menyusun prosedur yang mengatur bagaimana proses pemberian reward dan punishment dilakukan. Prosedur ini harus mencakup mekanisme evaluasi kinerja, penentuan penerima reward atau punishment, serta jenis penghargaan dan sanksi yang akan diberikan. 3. Mensosialisasikan kepada seluruh pegawai	Februari 2025	Belum menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi.	Mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi telah ditetapkan.
10	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS dilakukan secara tertib	Mengisi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara lengkap (berdasarkan form rencana tindak lanjut yang sudah dibahas setiap bulan pada rapat monev bulanan)	Setiap bulan	Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS tahun 2024 belum dilakukan secara tertib	Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS tahun 2024 dan 2025 dilakukan secara tertib
11	Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi	Analisis capaian kinerja pada aplikasi	Mengisi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara	Setiap bulan	Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS	Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS sudah

N o	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	SIMETRIS secara memadai	SIMETRIS optimal	lengkap (berdasarkan form rencana tindak lanjut yang sudah dibahas setiap bulan pada rapat moneyv bulanan)		belum optimal yaitu belum mencantumkan kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target	mencantumkan kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target
12	Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;	LEI direktif penugasan dan dievaluasi dalam Lapkin interim Tahun 2025	1. Menyusun penjelasan yang mencakup alasan dan latar belakang penambahan indikator kinerja, termasuk penambahan indikator direktif penugasan. 2. Menambah format laporan yang mencakup bagian khusus untuk menjelaskan indikator baru	April 2025	Laporan Kinerja Interim triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perjanjian Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024, yaitu: Nilai Pengelolaan BMN, Nilai Kualitas PBJ, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota , Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT, Nilai Pengelolaan Kearsipan	LEI direktif penugasan dan dievaluasi dalam Lapkin interim (Tahun 2025 IKU direktif penugasan tidak tercantum dalam PK dan RAPK)
13	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SKP Pimpinan, aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja;	Realisasi indikator kinerja antara SKP Kepala BPOM di Kediri, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja sama	1. Dibuatkan form penyalarsan data yang diisi oleh masing-masing Ketua Tim yang disetujui dan disahkan oleh penanggungjawab data dan Kepala UPT 2. Dibuatkan lembar	Setiap bulan	Terdapat Perbedaan realisasi indikator kinerja antara SKP Kepala BPOM di Kediri, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan	Tidak terjadi lagi perbedaan realisasi indikator kinerja antara SKP Kepala BPOM di Kediri, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja

N o	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
			konfirmasi perubahan data dan justifikasinya		Laporan Kinerja (sama dg 2.d)	
14	Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi periode triwulan sebelumnya	Laporan Kinerja triwulan tahun 2025 menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi periode triwulan sebelumnya	1. Mengumpulkan data kinerja untuk setiap triwulan sebelumnya untuk dijadikan dasar perbandingan dengan kinerja triwulan tahun berjalan. 2. melakukan analisis terkait perubahan pencapaian kinerja antar triwulan dan menambahkan analisis tersebut dalam laporan, untuk menjelaskan penyebab atau faktor yang mempengaruhi perbedaan kinerja.	TW I – TW IV	Laporan Kinerja triwulan II s.d. III tahun 2023 dan triwulan II s.d III tahun 2024 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi periode triwulan sebelumnya	Laporan Kinerja triwulan I tahun 2025 sudah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi periode triwulan sebelumnya
15	- Menyusun laporan Kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran - Menyusun laporan kinerja tahunan dengan menyajikan analisis penyebab kegagalan secara memadai	Laporan Kinerja Tahunan menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran - Analisis penyebab kegagalan terkait tidak tercapainya target indikator - Belum memadai (bukan merupakan kendala/ tidak mengidentifikasi akar masalah)	1. Penyusunan laporan kinerja interim membandingkan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya (sesuai dengan pedoman penyusunan Lapkin tahun 2025) 2. Menyajikan data analisis efisiensi dan penyebab kegagalan tidak tercapainya indikator (Bab III)	TW I – TW IV	Laporan Kinerja Tahun 2023: - Belum menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja persasaran - Analisis penyebab kegagalan terkait tidak tercapainya target indikator belum memadai (bukan merupakan kendala/tidak mengidentifikasi akar masalah)	Laporan Kinerja Tahun 2024 : - menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran - Analisis penyebab kegagalan terkait tidak tercapainya target indikator belum memadai (bukan merupakan kendala/tidak mengidentifikasi akar masalah)
16	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja terkait implementasi SAKIP	Personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja sudah mengikuti pelatihan terkait SAKIP	1. Identifikasi Personil yang Belum Mengikuti Pelatihan 2. Menentukan Jenis Pelatihan yang Diperlukan	TW II	Beberapa personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP	Personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja sudah mengikuti pelatihan terkait SAKIP

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
17	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan Evaluasi atas capaian RAPK triwulan bersangkutan	laporan evaluasi internal membandingkan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya	Penyusunan laporan evaluasi internal membandingkan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya (sesuai dengan pedoman penyusunan Lapkin tahun 2025)	TW I – TW IV	Laporan Evaluasi Internal triwulan III tahun 2024 belum menyajikan evaluasi atas capaian RAPK triwulan III tahun 2024 (menyajikan evaluasi atas capaian RAPK triwulan II tahun 2024);	laporan evaluasi internal membandingkan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya (sesuai dengan pedoman penyusunan Lapkin tahun 2025)
18	Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan Identifikasi kendala dan rekomendasi /rencana aksi secara memadai	Laporan Evaluasi Internal menyajikan Identifikasi kendala dan rekomendasi /rencana aksi secara memadai	1. Melakukan identifikasi kendala atau penyebab kegagalan pencapaian target. Dapat dengan memasukkan faktor eksternal seperti perubahan regulasi, keterbatasan anggaran, atau masalah logistik. 2. Menyusun rencana aksi yang konkrit dan relevan untuk mengatasi setiap kendala yang ditemukan	TW I – TW IV	Laporan Evaluasi Internal belum mengidentifikasi kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target, rekomendasi/ rencana aksi kurang relevan terhadap kendala yang telah diidentifikasi dan/atau belum terdapat rencana aksi	Laporan Evaluasi Internal sudah mengidentifikasi kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target, rekomendasi/ rencana aksi kurang relevan terhadap kendala yang telah diidentifikasi
19	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya	Laporan Evaluasi Internal triwulan menyajikan monitoring tindak lanjut rencana aksi periode sebelumnya	1. Mengumpulkan Data Tindak Lanjut dari Triwulan Sebelumnya 2. Melakukan Verifikasi Implementasi: Memverifikasi apakah tindak lanjut yang telah ditentukan pada triwulan sebelumnya telah dijalankan 3. menentukan status close/Open setiap rencana aksi triwulan sebelumnya.	TW I – TW IV	Laporan Evaluasi Internal triwulan I tahun 2024 belum menyajikan monitoring tindak lanjut rencana aksi periode sebelumnya	Laporan Evaluasi Internal triwulan I tahun 2025 belum menyajikan monitoring tindak lanjut rencana aksi periode sebelumnya

1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi kinerja diukur melalui perhitungan kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi (TE) dapat dihitung sebagai berikut :

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Pengukuran Tingkat Efisiensi adalah membandingkan indeks efisiensi terhadap standar efisiensi dengan data target anggaran (input) yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana) sampai dengan bulan Juni 2025. Hasil pengukuran indeks efisiensi pada triwulan II mengalami peningkatan dibandingkan dengan indeks efisiensi pada triwulan I. Dari 9 Sasaran Kegiatan yang dijabarkan menjadi 25 Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kediri, terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja dengan Tingkat Efisiensi (TE) **Efisien**, 8 (delapan) Indikator Kinerja **Tidak Efisien** dan 6 (enam) Indikator Kinerja **Belum dapat ditentukan**.

Indikator Kinerja dengan predikat Efisien antara lain :

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan,
Pada indikator ini realisasi kegiatan sampling, pengujian dan tindak lanjut telah memenuhi ketentuan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun realisasi anggaran yang telah sesuai dengan perencanaan
2. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
3. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Sampel PIRT yang disampling dan diuji telah diselesaikan pada Triwulan I sehingga nilai capaian telah memenuhi target dengan realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan
4. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
5. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Realisasi kinerja telah meningkat dibandingkan pada triwulan I dengan realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan. Pada Triwulan II telah dilaksanakan pemeriksaan pada 9 sarana produksi pangan fortifikasi sesuai target.
6. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
Tingkat Efisiensi pada IKU Pemenuhan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan stabil dari triwulan II, hal ini disebabkan penilaian Standar Ruang Lingkup di BPOM Kediri yang nilainya memenuhi target dengan input anggaran yang dapat direalisasikan sesuai dengan RPD.
7. Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT
8. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
9. Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

10. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan
11. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator Kinerja dengan predikat Tidak Efisien antara lain :

1. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar
2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder
3. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
4. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
5. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan
7. Jumlah Desa Pangan Aman
8. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator-indikator tersebut realisasi anggaran masih lebih tinggi dibanding Rencana Penarikan Dana, dimana beberapa kegiatan telah terealisasi namun tidak seimbang dengan perencanaan anggarannya, contohnya pada jumlah Desa Pangan Aman dan Jumlah Pasar Aman realisasi anggaran belum maksimal, pada triwulan I tahapan yang dilaksanakan adalah koordinasi dan advokasi yang dilaksanakan pada 1 Kabupaten dengan 3 terget IKU sekaligus, sehingga Tingkat efisiensi nya menjadi rendah.

Untuk indikator dengan Tingkat efisiensi yang belum dapat ditentukan disebabkan perbandingan target IKU tahunan dengan realisasi anggaran yang berjalan setiap bulan, sehingga tidak dapat dibandingkan.

Pengukuran efisiensi pada triwulan II tahun 2025 terhadap indikator kinerja Balai POM di Kediri dapat dimanfaatkan untuk melihat indikator yang perlu peningkatan dan keselarasan capaian output dan input pada triwulan berikutnya.

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Kediri Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Juni				Anggaran			Perhitungan Efisiensi			
					Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target Tahunan	RPD sd Juni	Realisasi anggaran Juni	%capaian	ie	te	capaian	kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81.75	81.75	99.75	122.02	122.02	25,944,700	19,790,951	76.28	1.60	0.60	92%	Efisien
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26		8.89	-	34.19	5,611,000	13,860,000	247.01	-	-	-	Belum dapat ditentukan
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	75	90	120.00	120.00	8,843,640	6,460,770	73.06	1.64	0.64	90%	Efisien
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	0	-	-	1,473,940	1,076,795	73.06	0.00	-1.00	-	Tidak Efisien
		5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	75	100	133.33	133.33	4,421,820	3,230,385	73.06	1.83	0.83	88%	Efisien
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	98	92	89.13	96.88	90.95	6,750,000	24,936,000	369.42	0.26	-0.74	-	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Juni				Anggaran			Perhitungan Efisiensi			
					Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target Tahunan	RPD sd Juni	Realisasi anggaran Juni	%capaian	ie	te	capaian	kriteria
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93	93	100	107.53	107.53	9,474,000	10,457,944	110.39	0.97	-0.03	-	Tidak Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	98.48	123.10	123.10	9,474,000	10,457,944	110.39	1.12	0.12	100%	Efisien
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25	92.25	94.23	102.15	102.15	10,431,125	15,075,000	144.52	0.71	-0.29	-	Tidak Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	98.54	123.18	123.18	3,140,000	8,335,000	265.45	0.46	-0.54	-	Tidak Efisien
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	87.97	87.97	98.31	111.75	111.75	11,357,000	1,177,700	10.37	10.78	9.78	75%	Tidak Efisien
		12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67	61	60.00	98.36	89.55	13,983,000	7,244,000	51.81	1.90	0.90	88%	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Juni				Anggaran			Perhitungan Efisiensi			
					Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target Tahunan	RPD sd Juni	Realisasi anggaran Juni	%capaian	ie	te	capaian	kriteria
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	11	11.87	107.91	84.79	1,317,403,080	1,369,377,769	103.95	1.04	0.04	100%	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84.37	84.37	88.00	104.30	104.30	11,284,000.00	10,184,156	90.25	1.16	0.16	100%	Efisien
		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	4	25	25	100.00	625.00	16,527,000.00	13,882,500	84.00	1.19	0.19	100%	Efisien
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	1	35	35	100.00	3500.00	0.00	5,460,000	-	-	-	-	Tidak Efisien
		17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	70	70	100.00	7000.00	1,435,000.00	7,379,004	514.22	0.19	-0.81	-	Tidak Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	91	50	73.89	147.78	81.20	1,452,000.00	1,909,500	131.51	1.12	0.12	100%	Efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	82	61	53.75	88.11	65.55	90,683,500.00	73,072,700	80.58	1.09	0.09	100%	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahunan	Juni				Anggaran			Perhitungan Efisiensi			
					Target	Realisasi	%Capaian Target Bulanan	%Capaian Target Tahunan	RPD sd Juni	Realisasi anggaran Juni	%capaian	ie	te	capaian	kriteria
	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	45.84	91.68	50.93	5,920,000	2,921,160	49.34	1.86	0.86	88%	Efisien
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.20	-	-	-	-	9,310,000	9,730,000	104.51	-	-	-	Belum dapat ditentukan
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.00	-	-	-	-	303,296,643	267,084,207	88.06	-	-	-	Belum dapat ditentukan
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	78.55	-	-	-	-	15,717,575	9,745,325	62.00	-	-	-	Belum dapat ditentukan
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	-	-	-	-	1,620,542,245	1,573,286,922	97.08	-	-	-	Belum dapat ditentukan
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	-	-	-	-	6,178,300	3,156,940	51.10	-	-	-	Belum dapat ditentukan
			Total realisasi						3,510,653,567	3,469,292,671	98.82				

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Kediri Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi secara periodik untuk pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2025 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Kediri terdiri dari 9 sasaran kinerja dengan 25 indikator kinerja utama.

Dari 9 sasaran kinerja, terdapat 7 (tujuh) sasaran kinerja yang dapat dilakukan evaluasi penilaian pada capaian TW II, sedangkan 2 (dua) sasaran kinerja lainnya evaluasi dilakukan pada periode akhir tahun dikarenakan sasaran kinerja tersebut memiliki target dan penilaian tahunan. Dari 7 (tujuh) sasaran kinerja yang ada terdapat 1 (satu) sasaran kinerja memiliki nilai capaian dengan kategori “Cukup”, 2 (dua) sasaran kinerja memiliki nilai capaian dengan kategori capaian “Baik”, 2 (dua) sasaran kinerja memiliki nilai capaian dengan kategori capaian “Sangat Baik”, dan 2 (dua) sasaran kinerja memiliki nilai capaian dengan kategori capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”. diperoleh hasil semua memperoleh capaian Nilai Kinerja Organisasi **“ISTIMEWA”**.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- Capaian sasaran kinerja satu sebesar 115,55% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Kediri dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kediri selama Triwulan II 2025.
- Capaian sasaran kinerja dua sebesar 98,36%% dengan kategori “Baik”, menunjukkan pelaksanaan pengawasan pada sarana produksi pangan fortifikasi sudah baik namun belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah adanya efisiensi anggaran pada awal tahun sehingga pelaksanaan pengawasan tidak bisa optimal.
- Capaian sasaran kinerja tiga sebesar 107,90% dengan kategori “Sangat Baik” menunjukkan keberhasilan Balai POM di Kediri dalam memenuhi Laboratorium

Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium selama Triwulan II 2025.

- Capaian sasaran kinerja empat sebesar 101,08% dengan kategori “Sangat Baik” menunjukkan keberhasilan Balai POM di Kediri dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kediri selama Triwulan II 2025.
- Capaian sasaran kinerja lima sebesar 147,78% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Kediri dalam meningkatkan melakukan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu produk OBA, Kosmetik dan Pangan Olahan. Capaian ini dipengaruhi oleh koordinasi dan kerjasama yang baik dengan lintas sektor terkait serta pelaku usaha yang aktif ikut pendampingan selama Triwulan II 2025.
- Capaian sasaran kinerja enam lima sebesar 88,11% dengan kategori “Cukup”, menunjukkan belum optimalnya Balai POM di Kediri dalam mengawal peningkatan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kediri selama Triwulan II 2025, hal ini disebabkan karena perubahan target perkara tahun 2025 dari sebelumnya 1 (satu) perkara menjadi 2 (dua) perkara sebagai dampak relaksasi anggaran pada akhir TW I 2025.
- Capaian sasaran kinerja tujuh sebesar 91,67% dengan kriteria **Cukup**, menunjukkan belum optimalnya Balai POM di Kediri dalam mengawal terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Kediri selama Triwulan I 2025.
- Capaian sasaran kinerja delapan belum terdapat capaian di TW II 2025 karena merupakan penilaian tahunan, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2025.
- Capaian sasaran kinerja sembilan belum terdapat capaian di TW II 2025 karena merupakan penilaian tahunan, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2025.

Persentase capaian Indikator Kinerja Balai POM di Kediri pada triwulan II tahun 2025 antara 88,11 % sampai dengan 147,78 %. Capaian indikator kinerja terendah

pada indikator “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” disebabkan karena perubahan target perkara tahun 2025 dari sebelumnya 1 perkara menjadi 2 perkara sebagai dampak relaksasi anggaran pada akhir TW I 2025. “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, faktor yang mendukung keberhasilan sasaran strategis ini adalah pemberian bimbingan kepada pelaku usaha melalui berbagai media (layanan tatap muka di Kantor Balai POM di Kediri dan Loker Mall Pelayanan Publik, layanan chat dan telfon serta melalui aplikasi zoom meeting online) sehingga kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi di bidang sertifikasi meningkat.

4.2 Saran

1. Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran strategis yang belum mencapai kategori Baik/Sangat Baik pada Triwulan II tahun 2025.
2. Menindaklanjuti rekomendasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada masing-masing indikator yang telah diuraikan pada Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang belum maksimal dalam pencapaiannya.
4. Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama yang tidak efisien pada Triwulan II tahun 2025.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta segera melakukan optimalisasi kegiatan yang tidak terlaksana.

LAMPIRAN I

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIAT TU PIMPINAN BPOM RI Tanggal Cetak : 30 Apr 2025 15:09	
KODE DISPOSISI : KODE SURAT : - TGL TERIMA SURAT : 30 April 2025 TGL TURUN DISPOSISI :	SIFAT SURAT : BIASA, PENTING, PENTING, SEGERA RAHASIA, SEGERA, ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
NO. SURAT : - ASAL SURAT ASLI : BALAI POM KEDIRI TGL SURAT : 17 April 2025 PERHAL : Perjanjian Kinerja Balai POM di Kediri DITERIMA DARI : BALAI POM KEDIRI	
DITERUSKAN KEPADA	
1. UNTUK DIKETAHUI 2. UNTUK EVALUASI 3. DISKUSIKAN DENGAN SAYA 4. DISETUJUI 5. UNTUK DIGUNAKAN 6. DISIAPKAN TELAAHAN/KAJIAN 7. HADIR MEWAKILI 8. DISIAPKAN BAHAN MATERI 9. SIAPKAN TANGGAPAN 10. UNTUK DITINDAKLANJUT 11. UNTUK DIARSIPKAN 12. DIAGENDAKAN 13. DIPANTAU / MONITOR 14. DIBERI MASUKAN 15. LAPORKAN 16. UNTUK DIKOORDINASIKAN 17. BAHAN UNTUK RAKORPIM 18. COPY KEMBALI	1. SESTAMA 2. DEPUTI 1 3. DEPUTI 2 4. DEPUTI 3 5. DEPUTI 4 6. IRTAMA 7. KARO UMUM / KARO K&H / PLT. KAPUSAKOM 8. 9. 10.
INSTRUKSI / INFORMASI KEPALA BADAN	
CATATAN SEKRETARIATAN X Mn 1/5/25	
PENCATAT : caraka	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINANTO

Jabatan : Kepala Balai POM di Kediri

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 21 March 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Kediri

WINANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KABUPATEN KEDIRI**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	98 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.97 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 Persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.37 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82 Persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.55 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 24,253,063,000 (Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	20,427,653,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,825,410,000

Kediri, 21 March 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Kediri



WINANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



TARUNA IKRAR

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KABUPATEN KEDIRI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	81.75	74,726,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44,850,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	40,122,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25,455,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	4,458,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	25,455,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	26,941,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	26,941,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	65,610,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	28,950,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	87.97	5,783,000
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		57	58	59	60	61	62	67	67	67	67	67	16,071,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			8	9.83	9.83	11	11	11	13	13	13	14	4,916,740,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	84.37	92,759,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			5	10	25	25	45	70	70	75	100	4	142,333,000
		03 - Jumlah desa pangan aman			5	10	25	35	50	60	70	80	100	1	126,918,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			5	10	25	70	100	100	100	100	100	1	76,318,000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	15	20	35	50	55	60	75	80	85	91	18,875,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	61	61	61	61	61	61	61	61	67.5	67.5	75	82	221,754,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	50,200,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	efektif di wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.2	84,350,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	14,894,955,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.55	67,896,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,129,910,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	44,692,000
Total															24,253,063,000

Kediri, 10 June 2025
Kepala Badan POM di Kediri

Winanto



SK IKU BPOM Kediri TAHUN 2025

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI
 NOMOR HK.02.02.19B.02.25.51 TAHUN 2025**

**TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI KEDIRI TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

-2-

Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BALAI BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI TAHUN 2025-2029. |
| Kesatu | : | Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Kedua | : | Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri. |

-3-

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KEDIRI,



SIDION

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KEDIRI
NOMOR HK.02.02.19B.02.25.51 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KEDIRI TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI
TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

-5-

SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPQB pangan olahan
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	Layanan Publik UPT yang prima
8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
9.2	Nilai AKIP UPT BPOM
9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KEDIRI,



GIDION